WARTA PEMERIKSA

Edisi 1 | Vol. II - JANUARI 2019

Tahun Hikmah dan Pembelajaran
Hal 13

FIPP Diharapkan Terus Hasilkan Standar Audit Berkualitas
Hal 22

Komitmen BPK Membangun Zona Integritas
Hal 41

Satukan Energi
Tingkatkan Sinergi
untuk Meraih Prestasi
BPK Kawal Harta Negara

Tahun

BPK RI

1 JANUARI 1947-2019

3 Dari Redaksi

4 Pembekalan untuk Para Pemeriksa

8 Ribuan Pemeriksaan Menanti BPK

13 Tahun Hikmah dan Pembelajaran

16 Makin Akrab dengan *Family Gathering*

22 FIPP Diharapkan Terus Hasilkan Standar Audit Berkualitas

24 BPK Ikut Berikan Pelatihan Pemeriksaan Lingkungan di India

25 Ida Sundari, Inspektur Utama BPK Bertekad Tingkatkan Tata Kelola

28 Abdul Gafar Usman, Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah RI Perkuat Sinergi dengan Berbagai Pihak

31 Asyiknya Bertugas di Gorontalo

34 Menangkap Peluang Tren Bisnis Kopi

36 Konsultasi Hukum Menggunakan Aplikasi *Online*

48 Ketua BPK Dukung Program Kerja Ikatan Akuntan Indonesia

40 JDIH BPK Kembali Raih Penghargaan

41 Komitmen BPK Membangun Zona Integritas

43 Sekilas tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

47 Berita Foto

Warta Pemeriksa mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh pembaca setia. Tahun baru berarti kita semua memasuki lembaran baru. Akan tetapi, tahun baru juga berarti momentum untuk melakukan kontempelasi atas seluruh kejadian yang telah terjadi pada tahun sebelumnya.

Memasuki tahun baru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga merayakan hari ulang tahun ke-72 yang jatuh pada 1 Januari 2019. Isu ini yang menjadi liputan utama pada *Warta Pemeriksa* edisi Januari.

Pada edisi ini kami menyajikan informasi bagaimana BPK memasuki usia dan tahun baru. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengajak seluruh pegawai untuk memandang 2018 sebagai tahun penuh hikmah dan pelajaran. Banyak hal yang dialami lembaga pemeriksa ini pada tahun lalu. Hal yang perlu direnungi antara lain, bencana alam dan musibah yang justru menjadi semangat untuk semakin meningkatkan kekeluargaan dan kinerja.

Mulai dari gempa bumi dan tsunami di Lombok, Palu, hingga Banten. Selanjutnya adalah musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang merupakan salah satu musibah terbesar di industri dirgantara Tanah Air. Bagi keluarga besar BPK, kejadian ini juga menjadi musibah yang terasa secara personal. Ini mengingat, 10 pegawai BPK menjadi korban pada jatuhnya pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkalpinang itu.

Pada liputan utama, kami juga menyajikan informasi mengenai perayaan ulang tahun yang dilakukan BPK. Misalnya, kemeriahan pegawai BPK dan keluarga pada saat mengikuti *family gathering* pada Sabtu, 12 Januari 2019.

Sementara pada rubrik BPK Bekerja, kami menyajikan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan yang menjadi *core business* BPK. Mulai dari fokus pemeriksaan pada tahun 2019 hingga rencana pengembangan teknologi untuk meningkatkan mutu pemeriksaan. Teknologi diyakini dapat mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan.

Pada rubrik Sudut Pandang, kami juga menyajikan wawancara dengan Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Abdul Gafar Usman. Dia menjelaskan antara lain sinergi BAP DPD dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Ini diwujudkan melalui dukungan BPK terkait data hasil audit. Termasuk juga klarifikasi atas pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan penyelesaian/pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK.

Sementara pada rubrik Perjalanan, Krishna Pambudi, auditor perwakilan Provinsi Gorontalo bercerita mengenai pengalaman pertamanya saat mendapat penugasan tersebut. Misalnya bagaimana dia beradaptasi dengan kondisi pedesaan di Gorontalo dan kisahnya mencoba bentor yang merupakan kendaraan khas daerah tersebut.

Sebagai penutup, kami berharap, 2019 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua, khususnya pembaca setia *Warta Pemeriksa*. ●

Tim Editorial

Pengarah
Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab
Juska Meidy Enyke Sjam

Supervisi Penerbitan
Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi
Sri Haryati

Redaksi
Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Eko
Radiansyah Said
Reny Jingga

Kepala Sekretariat
Trisari Istiati

Sekretariat
Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Reza Hadi Satria
Ridha Sukma
Sudarman

Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pembekalan untuk Para Pemeriksa

Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK juga harus memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta pemangku kepentingan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumpulkan ratusan pemeriksa di auditorium kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (15/1). Para pemeriksa dikumpulkan untuk mendengarkan arahan dari para Pimpinan dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam pidatonya saat membuka acara mengatakan, *workshop* sangat penting dilakukan. Sebab, pemeriksaan atas LKPP, LKKL dan LKBUN merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BPK, dan Undang-Undang APBN.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPR atas rancangan UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Pemerintah.

"Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan pemeriksaan ini dengan sebaik-baiknya karena waktu yang terbatas, nilai APBN yang semakin besar, dan banyaknya entitas yang diperiksa, serta keterlibatan jumlah pemeriksa yang banyak dari seluruh AKN (Auditorat Keuangan Negara)," kata Bahrullah.

Pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN ini merupakan pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP.

Ketiga, Bahrullah menambahkan, dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan. Terakhir, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Bahrullah mengatakan walaupun sudah dilakukan secara rutin, namun pemeriksaan ini selalu menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Hal itu lantaran adanya perubahan dan dinamika di lingkungan internal pemeriksa dan lingkungan eksternal.

Dari sisi internal, dinamika itu adalah adanya implementasi Sistem Informasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP LK), penyempurnaan modul konsolidasi khususnya dokumentasi penilaian risiko dan PM/TM, dan kebijakan pemeriksaan pinjaman hibah luar negeri oleh BPK RI yang diintegrasikan dengan pemeriksaan LKKL.

helloquenc-unsplash

■ Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar

Selain itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan belanja subsidi menjadi satu penugasan dengan pemeriksaan LKBUN. Terakhir, pemeriksaan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang dilaksanakan mengikuti jadwal pemeriksaan dan penyusunan LKPP/LKKL.

Adapun beberapa dinamika eksternal yang menjadi tantangan antara lain adalah pemerintah tidak mengusulkan APBN Perubahan (APBN-P 2018) dan adanya pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017 dan 2018.

Di hadapan para pemeriksa dan unsur pimpinan BPK lainnya, Bahrullah berpesan agar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK juga harus memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta pemangku kepentingan.

"Kita perlu memberikan perhatian terhadap apa yang menjadi harapan para pemangku kepentingan, seperti DPR sebagai cermin harapan rakyat, pemerintah, instansi penegak hukum, Warga Negara Indonesia, lembaga internasional, dan lainnya," ucap Bahrullah.

Berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilakukan BPK, kata Bahrullah, para pemangku kepentingan berharap agar arah pemeriksaan BPK dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, rekomendasi yang diberikan BPK mesti dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi entitas.

Bahrullah juga berpesan kepada seluruh pemeriksa agar tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme agar hasil pemeriksaan tetap objektif. Pesan itu disampaikan Bahrullah mengingat tahun ini akan diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak.

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah, BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPP, LKKL, LKBUN Tahun 2018 dapat memberikan rekomendasi atas permasa-

> Saya meminta agar kita semua bersinergi untuk menyatukan energi dengan mengedepankan kepentingan BPK demi mewujudkan BPK yang lebih berprestasi.

lahan-permasalahan strategis dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun pertanggungjawabannya.

Permasalahan-permasalahan yang berdampak pada opini agar diperlakukan secara konsisten antar kementerian/lembaga. "Oleh karena itu, Tim Pokja LKPP agar benar-benar mengawasi konsistensi dalam pemberian opini tersebut," Bahrullah berpesan.

Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Upaya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan turut menjadi pesan yang disampaikan Bahrullah. Agar kualitas terus meningkat, ia berpesan kepada setiap pejabat fungsional pemeriksa untuk menjalankan fungsi sesuai peran dan berpedoman pada metodologi yang berlaku. Sebagai wujud *quality control* dalam proses pemeriksaan, maka setiap individu diwajibkan melakukan fungsi kontrol sesuai perannya masing-masing.

Penggunaan aplikasi SiAP juga turut mendukung proses *quality assurance* dan *quality control* dalam pemeriksaan. "Karena, aplikasi SiAP ini memfasilitasi proses reviu baik reviu langkah maupun reviu akun," ujar Bahrullah.

pxhere.com

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik, Bahrullah juga menekankan perlunya komitmen yang harus dipatuhi dan dijalankan semua pihak atas hal-hal yang telah disepakati dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN.

"Hal-hal yang telah disepakati bersama seperti jadwal pemeriksaan, kerangka acuan kerja, dan harapan penugasan pemeriksa, seyogyanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga, seluruh tahapan pemeriskaan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan dan sesuai standar pemeriksaan.

Bahrullah menegaskann, penyampaian hasil pemeriksaan LKPP telah diatur dalam undang-undang. Sehingga, BPK harus menyampaikan hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

"Oleh karena itu, saya meminta agar kita semua bersinergi untuk menyatukan energi dengan mengedepankan kepentingan BPK demi mewujudkan BPK yang lebih berprestasi," kata Bahrullah.

Seusai pengarahan dari Wakil Ketua BPK, para pemeriksa mendapat pembekalan dari para Anggota, yaitu Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK Rizal Djalil, Anggota V BPK Isma Yatun, dan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis.

Secara umum, kegiatan persiapan pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh arah dan kebijakan pemeriksaan BPK, memutakhirkan pemahaman sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan negara, dan memperoleh arahan terkait strategi pemeriksaan sebagai tindak lanjut arahan Badan. Kemudian, memutakhirkan penilaian risiko dan menetapkan PM/TM LKKL/LKBUN serta menginputnya pada modul konsolidasi. Terakhir, bertujuan menjaga kualitas pemeriksaan BPK dan menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. ●

Ribuan Pemeriksaan Menanti BPK

myrfa-pixabay.com

Selain pemeriksaan yang sudah terjadwal, BPK menyatakan siap melakukan pemeriksaan atas permintaan dari pemangku kepentingan terhadap permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik.

Tahun 2019 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain cakupan pemeriksaan yang semakin luas, ada berbagai peristiwa besar yang dikawal BPK.

Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK Dali Mulkana mengatakan, BPK akan melakukan 1.780 pemeriksaan sepanjang tahun ini. Ribuan pemeriksaan itu sudah disetujui dalam sidang Badan pada akhir Desember 2018 untuk dijadikan sebagai rencana kerja BPK tahun 2019.

Dali mengatakan, BPK tetap meneruskan pemeriksaan dengan tema dan fokus yang tertuang dalam Renstra BPK 2016-2020, baik itu dalam bentuk pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Apalagi, kata Dali, tahun ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah yang diperiksa BPK secara berkesinambungan.

"Mudah-mudahan di akhir tahun 2019 atau di awal 2020, sudah ada kesimpulan besar dari program pemerintah yang kita periksa," kata Dali kepada *Warta Pemeriksa*.

Dali menambahkan, tahun ini ada beberapa hal baru terkait pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang sudah terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Nantinya, akan ada tim tersendiri yang memeriksa LKBUN. Waktu pemeriksaannya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan laporan keuangan (LK).

Hal baru lainnya bagi BPK adalah terkait pemeriksaan terhadap kekayaan milik negara yang dipisahkan. Tahun ini, BPK tak hanya memeriksa perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Dali mengungkapkan, BPK pun bakal memeriksa badan layanan umum negara (BLUN) serta badan layanan umum daerah (BLUD).

"BLUD/BLUN juga menjadi entitas yang akan diperiksa BPK. Jadi cakupan pemeriksaan BPK semakin luas," kata Dali.

Persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga tak luput dari pengawalan BPK. "BPK pun juga ingin melihat bagaimana secara keseluruhan persiapan untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia," katanya menambahkan.

Tahun lalu, ujar Dali, sudah dimulai pemeriksaan dari sisi perencanaan dan implementasinya di beberapa daerah. Pada 2019 ini, BPK berharap bisa menyisipkannya di dalam pemeriksaan tema dan fokus untuk melihat persiapan pelaksanaan SDGs.

Dali menambahkan, BPK pada tahun ini juga bakal melakukan pemeriksaan terhadap dua agenda besar yang terjadi di Indonesia. Pertama, adalah pemeriksaan pelaksanaan Asian Games 2018. Kedua, pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu.

"Ini adalah dua hal besar yang terjadi di Indonesia. Asian Games karena menjadi peristiwa besar bagi negara kita, BPK turut serta untuk melihat dari sisi akuntabilitasnya," kata dia.

Siap Penuhi Kebutuhan Publik

Selain pemeriksaan yang sudah terjadwal, BPK menyatakan siap melakukan pemeriksaan atas permintaan dari pemilik kepentingan terhadap permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik.

"Tentunya, pemeriksaannya untuk apa tidak bisa direncanakan secara pasti karena tergantung permintaan. Tapi, BPK sudah mencadangkannya," ujar dia.

Biasanya, ujar Dali, permintaan pemeriksaan itu datang dari DPR, DPD, atau asosiasi tertentu yang menurut mereka BPK perlu melakukan pemeriksaan atas suatu permasalahan.

Dia mencontohkan, salah satu topik yang saat ini sedang menjadi perhatian publik adalah masalah kelaikan dan keselamatan transportasi. BPK mempunyai kekuasaan untuk melihat satu peran, yaitu bagaimana sisi dan batas dari kelaikan dan keselamatan transportasi.

"Ini juga sudah direncanakan di 2019. Ini bagian permintaan dari publik. Jadi, pemeriksaan BPK juga sesuai dengan harapan publik."

BPK juga bisa saja melakukan pemeriksaan terkait bencana. Asalkan, ada permintaan dari pemangku kepentingan maupun publik. Sebab, pemeriksaan bencana belum masuk ke dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) 2019.

"Sepertinya sudah ada wacana dari pemangku kepentingan terkait pemeriksaan itu. Namun, saya tidak tahu apakah surat resminya sudah masuk atau belum ke BPK. Setelah ada surat resmi dari pemohon, kita bahas di internal dan kemudian baru direncanakan," ujar Dali.

Menurut dia, BPK akan sangat meres-

> Jumlah entitas yang diperiksa oleh KAP untuk tahun ini juga meningkat dari tahun lalu sebanyak 42 entitas, sekarang jadi 57 entitas. Itu tersebar baik di pusat maupun di perwakilan.

rawpixel-unsplash

■ Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK, Dali Mulkana

pons permintaan pemeriksaan yang berkaitan dengan bencana alam, termasuk soal pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana jadi hal penting mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. "Saya rasa itu akan segera direspons BPK kalau sudah ada permintaan."

Peningkatan Pemeriksaan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dari sisi jenis pemeriksaan, BPK bakal meningkatkan porsi pemeriksaan kinerja pada tahun ini. Pada 2018, target pemeriksaan kinerja sebesar 21 persen dari total pemeriksaan, dapat terealisasi. Bahkan, kata Dali, sedikit melampaui target. Tahun ini, porsi pemeriksaan kinerja ditingkatkan menjadi 23 persen.

"Ini sejalan dengan rencana besar kita untuk menaikkan porsi kinerja sebagaimana Renstra kita. Jumlah entitas yang diperiksa oleh KAP untuk tahun ini juga meningkat dari tahun lalu sebanyak 42 entitas, sekarang jadi 57 entitas. Itu tersebar baik di Pusat maupun di Perwakilan," kata Dali.

Yang tak kalah penting adalah peningkatan target terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Peningkatan target sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu, BPK menganggap perlu menaikkan target karena pada 2017 realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sangat rendah, yaitu sekitar 61 persen.

BPK kemudian melakukan evaluasi dengan melakukan perbaikan sistem penyelesaian tindak lanjut. BPK juga melakukan komunikasi kepada auditee. Sehingga, ujar dia, pada 2018 ada peningkatan penyelesaian tindak lanjut di atas 70 persen.

"Tahun 2019 targetnya kita usul untuk dinaikkan menjadi 75 persen. Harapannya di 2020 bisa naik lagi menjadi 80 persen. Ini trennya positif dan sesuai dengan yang diharapkan."

Menurut Dali, para entitas semakin memahami pentingnya penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Bagi BPK, tindak lanjut merupakan salah satu barometer pengukuran keberhasilan.

"BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi kita dapat ditindaklanjuti baik dalam skala wilayah, sektoral, maupun nasional," ucapnya. ●

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT ULANG TAHUN KE 72

DIRGAHAYU BPK RI

1 Januari 1947 - 2019

Refleksi 72 Tahun

B anyak cara untuk membangun dan menyejahterakan negeri Indonesia yang kita cinta

P emeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mungkin adalah salah satunya

K awal harta negara agar terhindar dari korupsi, penyalahgunaan, penyimpangan, pemborosan, maladministrasi dan salah kelola

R akyat jugalah yang nantinya akan merasakan dampak dari kualitas dan manfaat pemeriksaan BPK

I ndonesia yang adil makmur dan sejahtera semoga cepat terwujud melalui kiprah BPK dengan Tri Dharma Artha Sentosa

---

B agaimana BPK memeriksa telah ditetapkan dengan standar, metodologi dan panduan yang jelas lengkap terstruktur

P emeriksanya pun harus memenuhi standar kompetensi dan mengikuti 40 Jam PPL per tahun serta syarat lainnya yg diatur

K elayakan pekerjaannya ditandai dengan seberapa tingkat kepatuhan mereka pada S.O.P dan *audit procedure*

R *isk Based Audit* karenanya diterapkan agar sasaran uji petiknya terukur dan analisis buktinya tidak melantur

I ndependensinya dijaga agar laporan auditnya obyektif tidak *ngawur* dan terhindar dari simpulan yang *lebay* atau prematur

---

B idang fokus dan tema audit yang mengacu pada RPJMN ditetapkan dalam Renstra 5 tahunan

P enentuan obrik dan sumber daya audit per tahun lalu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemeriksaan

K emudian dilaksanakanlah pemeriksaan oleh tim audit berdasarkan Surat Tugas dan Program Pemeriksaan

R eviu, observasi, verifikasi, cek fisik dan wawancara untuk kumpulkan bukti pendukung temuan dan susun laporan

I khtisar Hasil Pemeriksaan akhirnya disampaikan setiap semesteran kepada yang terhormat anggota dewan

---

B ebas mandiri memberi keleluasaan bagi BPK dalam hal operasional audit, mulai dari penentuan obrik, metodologi, hingga substansi dan timing laporan terbit

P emeriksa BPK formasinya mulai ditambah sedikit demi sedikit, dalam wadah jabatan fungsional tempat auditor profesional mulai mengorbit

K uota anggaran BPK diusulkan langsung ke DPR tanpa prosedur berbelit, dengan alokasi utk operasional audit dan kesejahteraan profesi terus melejit

R evisi SOTK Pelaksana BPK kini tak lagi begitu sulit, meski harus tetap konsultasi ke Menpan demi menjaga struktur ASN tetap *slim* dan *fit*

I munitas BPK membuat rasa aman dalam bertugas mulai membersit, namun bukan untuk berlaku sewenang- wenang, "sok elit" apalagi "cari penyakit"

B ila ditanya bagaimana mengawasi BPK dalam menunaikan tugas mandat, mekanisme akuntabilitas di BPK terbilang ketat

P engendalian mutu diperiksa dengan peer review kolega internasional sejawat, agar BPK selalu update dengan standard yang berkembang pesat

K euangan BPK diaudit oleh KAP yang ditunjuk wakil rakyat, untuk menjamin pengelolaannya sesuai SAP, transparan, taat dan cermat

R eviu audit dilakukan secara berjenjang oleh tim dan manajemen setiap saat, untuk memastikan pemeriksaan BPK berkualitas dan bermanfaat

I ndikator sistem pengendalian mutu diawasi oleh Inspektorat, sebagai garda pertahanan terakhir dalam *three line of defense* yang kuat

---

B erbagai capaian kinerjanya dari dulu hingga sekarang, tercatat sebagai prestasi BPK yang cemerlang

P restasinya di tingkat nasional menjadikan BPK sebagai bintang, mulai dari opini WTP, terbaik laporan kinerja, hingga predikat WBK ZI yang disandang

K asus korupsi yang diproses hukum dari audit BPK juga banyak terbilang, mulai dari BLBI, BPPN, YPPI hingga Century dan Hambalang

R elasi internasional BPK pun cukup disegani dan kondang, dari inisiator AseanSAI, ketua WGEA INTOSAI, hingga posisi auditor IAEA PBB yang kini dipegang

I tulah bukti bahwa BPK punya prestasi segudang, sebagai pendorong tata kelola dan *leading by example* di berbagai bidang

---

B adai ujian bukan tidak pernah datang menimpa, namun itu tidaklah membuat BPK terpuruk begitu lama

P ernah dibawah kendali pemerintahan pada rezim sebelumnya, kini BPK bisa berdiri sejajar dan bekerja bebas mandiri sebagai lembaga negara

K asus hukum dan masalah internal yang pernah menerpa, akhirnya menjadi pelajaran agar risiko BPK lebih prudent dikelola

R esistensi dan pembatasan dari entitas yang dialami auditor BPK, kini mulai terbuka dan bahkan meminta untuk diperiksa

I nsiden kecelakaan dan bencana yang merenggut staf dan auditornya, direspons BPK dengan empati, kesigapan dan jiwa korsa

---

B anyaknya peluang-kekuatan tidak menjadikan BPK pongah, besarnya tantangan-masalah tidak membuatnya lemah

P aket UU Keuangan Negara yang memperkuat mandat BPK adalah berkah sekaligus juga amanah

K emajuan teknologi telah dimanfaatkan sebagai sarana kerja penunai tanggung jawab yang bertambah

R isiko gugatan hukum tidak akan pernah membuat BPK goyah dan auditornya galau, takut apalagi surut melangkah

I nsan BPK terus bekerja tanpa kenal lelah, tidak pernah berkeluh kesah meskipun defisit dalam formasi dan jumlah

---

B esar harapan *stakeholder* dan tuntutan publik pasti terlintas dan menyeruak saat HUT 72 BPK

P emeriksaan yang kian berkualitas dan makin bermanfaat agar dapat dilaksanakan lebih bebas dan mandiri

K oordinasi dan komunikasi antar instansi supaya terus dan terus ditingkatkan dalam kerjasama yang bersinergi

R uang publik BPK agar selalu terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan serta mendapatkan layanan informasi

I ndependensi, Integritas dan Profesionalisme supaya tetap terjaga oleh auditor BPK yang berdedikasi

Tahun Hikmah dan Pelajaran

Peningkatan jumlah opini WTP tak lepas dari peran BPK melalui rekomendasi dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menjadi inspektur upacara peringatan HUT BPK RI.

■ Upacara Peringatan HUT ke-72 BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memandang 2018 sebagai tahun hikmah dan pelajaran. Banyak hal yang dialami lembaga pemeriksa ini pada tahun lalu. Hal yang mendalam yang dialami antara lain, bencana alam dan musibah yang justru menjadi semangat untuk semakin meningkatkan kekeluargaan dan kinerja.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, perjalanan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara telah berlangsung selama 72 tahun. Khusus tahun lalu, menjadi tahun yang penuh perenungan.

"Di antara hikmah yang sangat perlu untuk BPK renungkan adalah berbagai cobaan yang dialami selama satu tahun yang lalu. Bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di Lombok, Palu, dan Banten turut berdampak pada keluarga besar BPK," ujar Ketua BPK saat menjadi inspektur upacara bendera dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-72 di halaman Kantor BPK RI, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Selanjutnya, kata Ketua BPK, adalah musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang menjadi salah satu musibah terbesar di industri dirgantara Tanah Air. Bagi BPK, kejadian ini juga menjadi musibah yang terasa secara personal. Ini mengingat, 10 pegawai BPK menjadi korban pada jatuhnya pesawat dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkalpinang itu.

"Musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 juga membuat kita semua merasakan kehilangan anggota keluarga satu korsa BPK," papar Ketua BPK.

Tak hanya itu, kata Moermahadi, BPK juga kehilangan salah satu unsur pimpinan, yaitu Anggota VII BPK, Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi yang telah mendahului kembali ke *Rahmatullah*. "Kejadian ini semua memberikan pelajaran kepada kita agar semakin erat menjaga kekeluargaan dengan sesama insan BPK. Karena dengan rasa kekeluargaan inilah akan meneguhkan kita menghadapi cobaan serta menguatkan kita dalam menjalankan tugas mulia BPK," ujar Moermahadi.

Moermahadi menambahkan bahwa kekuatan melalui semangat kekeluargaan memang menjadi tema dalam peringatan HUT BPK ke-72, yaitu "Energi, Sinergi, Prestasi". Semangat persaudaraan dan kekeluargaan antarinsan BPK merupakan energi yang besar dan harus semakin dikuatkan dengan sinergi setiap unit kerjanya. Dengan begitu BPK dapat semakin berprestasi dalam mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Upacara yang dikomandani Kepala Auditorat III B Slamet Riyadi berlangsung hikmat dan dihadiri oleh sejumlah Pimpinan BPK periode terdahulu. Mulai dari J.B. Sumarlin, Anwar Nasution, Hadi Poernomo, dan Sapto Amal Damandari. Dalam kesempatan ini, Moermahadi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-72 BPK kepada para pendahulu, rekan-rekan kerja, dan seluruh pegawai BPK beserta keluarga di manapun berada.

WTP meningkat

Dengan usia lebih dari tujuh dekade, kata Moermahadi, BPK telah banyak menyumbangkan tenaga bagi kemajuan negara dan bangsa. Peningkatan opini WTP pada LKPP, LKKL, dan LKPD merupakan kontribusi besar BPK dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BPK pun terus mendorong penggunaan keuangan negara agar benar-benar ditujukan untuk pencapaian tujuan bernegara. Hal ini dilakukan melalui pemerik-

■ Syukuran HUT BPK RI

saan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

"Kita patut bersyukur atas capaian prestasi BPK selama ini yang tercermin dari diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP sejak 2016, meningkatnya opini WTP LKKL dari 84 persen pada tahun 2016 menjadi 91 persen pada tahun 2017, dan opini WTP LKPD meningkat dari 70 persen pada tahun 2016 menjadi 76 persen pada tahun 2017," kata Ketua BPK.

Menurutnya, peningkatan jumlah opini WTP pada LKKL dan LKPD ini tidak lepas dari peran BPK melalui rekomendasi dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini yang meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah saat ini.

> Keberhasilan kita dalam melaksanakan kebijakan fokus pemeriksaan ini berdampak positif bagi level kematangan organisasi BPK agar meningkat dari level *oversight* menuju level *insight* atau *foresight*.

Prestasi internasional

Sepanjang 2017, BPK tak hanya menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di dunia internasional pun, BPK turut menorehkan tinta emas. Misalnya saja dengan berhasil kembali terpilih sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk periode 2017-2019. Kemudian prestasi menjadi anggota panel auditor eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas sebagai lembaga pemeriksa untuk badan-badan dalam komunitas PBB.

BPK juga terlibat dalam pemeriksaan Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan organisasi BPK sedunia. "Keaktifan BPK di dunia internasional adalah bagian dari peningkatan kapabilitas pemeriksa dan menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam pemeriksaan lembaga internasional," papar Ketua BPK.

Moermahadi menjelaskan, BPK telah berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan yang lebih menyentuh isu-isu sentral dalam masyarakat melalui kebijakan tema dan fokus pemeriksaan. BPK telah melaksanakan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang bersifat lintas sektor.

"Pada pengujung Renstra periode ini, saya mengharapkan BPK dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian program pembangunan pada RPJMN," papar Ketua BPK.

Untuk itu, jelas Moermahadi, BPK harus terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi implementasi fokus pemeriksaan. Dengan begitu, BPK dapat merumuskan simpulan atau penilaian mendalam atas agenda pembangunan nasional.

"Keberhasilan kita dalam melaksanakan kebijakan fokus pemeriksaan ini berdampak positif bagi level kematangan organisasi BPK agar meningkat dari level *oversight* menuju level *insight* atau *foresight*," kata Moermahadi menambahkan. ●

■ Para penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Makin Akrab dengan *Family Gathering*

■ Foto bersama keluarga besar BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memandang kekeluargaan dan silaturahim sebagai salah satu kekuatan yang harus terus dipertahankan. Hal ini harus terus dibina, misalnya saja dengan menggelar acara berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai BPK dan keluarganya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, *family gathering* merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mempererat silaturahim dan persaudaraan di keluarga besar BPK. Dia pun berharap kebersamaan itu agar dapat terus dijaga.

"Dengan acara ini kita mengharapkan kedekatan antarpegawai dan antarkeluarga akan terjalin. Karena tanpa dukungan dari seluruh pegawai, termasuk juga keluarga, BPK akan sulit untuk mencapai prestasi-prestasi seperti sekarang ini," kata Moermahadi saat memberikan sambutan acara *family gathering*, Sabtu, 12 Januari 2019.

Acara *family gathering* dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-72 berlangsung meriah. Kegiatan itu dipadati seluruh pegawai BPK yang sudah datang sejak pagi hari.

Dimulai dengan lomba senam ceria, pada pukul 07.00 WIB seluruh pegawai BPK mulai berdatangan. Mereka berbondong-bondong mengikuti lomba senam karena ada *doorprize* bagi yang bersemangat.

■ Sekjen BPK, Bahtiar Arif, melaporkan penyelenggaraan kegiatan *family gathering*

> Tanpa dukungan dari seluruh pegawai, termasuk juga keluarga, BPK akan sulit untuk mencapai prestasi-prestasi seperti sekarang ini.

Adapun anak-anak yang mengikuti senam ceria mendapatkan permen gula lolipop dari panitia sebagai bentuk apresiasi. Panitia juga menyediakan bazar dan area bermain anak-anak.

Usai lomba senam ceria, Sekjen BPK Bahtiar Arif memberikan pidatonya terkait laporan penyelenggaraan kegiatan *family gathering*. Bahtiar menyebut bahwa tujuan dari pelaksanaan *family gathering* ini adalah untuk mempererat rasa kekeluargaan antara Pimpinan dan seluruh pegawai BPK. Dengan begitu, bisa bersama-sama membangun kembali semangat kerja, mengumpulkan energi, dan meningkatkan sinergi untuk BPK yang berprestasi. "Hal ini sesuai dengan tema HUT yang ke 72 BPK RI yaitu Energi, Sinergi, dan Prestasi."

Bahtiar pun mengapresiasi para karyawan yang menyempatkan datang ke acara *family gathering*. Berdasarkan pendaftaran yang diperoleh, peserta kegiatan bersama keluarga itu sebanyak 4.920 orang.

"Kita beri *applause* untuk seluruh keluarga BPK dan mudah-mudahan *family gathering* ini bisa mencapai tujuannya. Acara *family gathering* ini merupakan rangkaian acara HUT BPK yang didahului dengan perlombaan-perlombaan. Baik olahraga, seni, teknologi informasi, maupun kinerja

■ Aksi eksibisi panahan

■ Senam poco-poco dan maumere

■ Penampilan Tarian Nusantara

pelaksanaan BPK," ujar Bahtiar.

Bahtiar juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh pejabat serta pelaksana BPK yang berkenan hadir pada acara *family gathering*. Juga kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang telah membantu kelangsungan acara tersebut.

Acara *family gathering* secara simbolik dibuka dengan aksi eksibisi panahan yang diwakili oleh Ketua BPK, Wakil Ketua Bahrullah Akbar, Anggota II Agus Joko Pramono, Anggota III Achsanul Qosasi, dan Anggota V Isma Yatun. Dalam hitungan mundur, mereka secara bersama-sama melesatkan anak panah ke arah target sebagai tanda resmi dimulainya *family gathering* BPK.

Acara ini juga diisi dengan penampilan senam poco-poco dan maumere yang disajikan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BPK Pusat. ●

Kebanggaan dan Tantangan

Warta Pemeriksa berkesempatan untuk mewancara pencipta lagu mars dan hymne BPK, **Harry Budiman**. Kali ini, Harry bercerita mengenai pengalaman dan inspirasinya ketika menuliskan dua lagu tersebut. Berikut wawancaranya.

Dari mana tercetus ide untuk lagu ini?

Awalnya saya diminta untuk membuat versi yang baru atau mengganti lagu BPK. Sekarang ada dua bentuk, yaitu hymne dan mars. Hymne untuk memberi introspeksi sementara mars untuk memberi semangat.

Kalau lirik itu inspirasinya dari mana?

Jadi, bicara kalau kita merasa sebagai warga negara Indonesia. Bahwa kalau misalnya ada jiwa ingin mengabdi, *nah* berangkat dari situ. Bahwa saya ingin menyemangati bangsa Indonesia sebagai warga. Kalau hymne, juga sebagai introspeksi.

Proses terjadinya lagu ini seperti apa? Awal sampai selesai itu berapa lama?

Karena memang lagi *mood* kali ya atau memang karena saya juga dapat data input tentang visi misinya cukup jelas. Apalagi saya juga tertantang. Jadi itu pengerjaan sekitar satu pekan. Dengan musiknya lagi, jadi dua pekan.

Itu tahun berapa?

Tahun 2013.

Apakah ada kendala ketika membuat lagu itu?

Kalau kendala, tidak ada. Hanya memang, ini pertama kali saya membuat hymne. Sebelumnya, saya memang sebagai komposer, *arranger*, dan produser di industri. Untuk lembaga tinggi seperti ini, saya belum pernah. Ini merupakan kebanggaan dan tantangan. Tantangannya pertama buat hymne. Karena hymne itu memang dibanding mars, memang memberikan semangat. Saya sudah membuat beberapa kali. Kalo hymne, ini baru pertama kali. *Nah*, terus memang ada yang berbeda. Di sini, ada satu visi misi BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesional. Jadi judul lagu harus ada semangat itu, semangat untuk tiga poin itu.

Apa harapan Anda untuk BPK dengan lagu ini?

BPK merupakan badan pengawal harta negara. Jadi memang badan yang sangat dibutuhkan. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada Allah. Saya bersyukur sudah diberi kepercayaan membuat lagu. Sebenarnya ini juga bisa saya anggap, bahwa saya menyumbang untuk negara melalui BPK. ●

Mars BPK

Wahai Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Hayatilah dan amalkan pengabdianmu
Dengan menjunjung tinggi independensi
Integritas dan profesionalisme
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara

Demi bangsaku Indonesia
Tanah air tercinta
Kami siap jiwa dan raga
Mengabdi untuk negara
Tegar tak kan gentar
Menjaga mengayomi harta negara
Dengan semangat Pancasila

Hymne BPK

Kami sang abdi negara
Mengemban tugas mulia
Untuk tanah air tercinta
Demi bangsaku Indonesia

Kami siap jiwa dan raga
Mengabdi untukmu negara
Tegar takkan pernah gentar
Menjaga harta negara
Dengan semangat Pancasila

Kami sang abdi negara
Badan pemeriksa keuangan
Bersumpah dengan hati yang kuat
Selalu ada untukmu Indonesia

Kami siap jiwa dan raga
Mengabdi untukmu negara
Tegar takkan pernah gentar
Menjaga harta negara
Dengan smangat Pancasila

Presiden Joko Widodo

BPK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kita percaya BPK dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan prinsip-prinsip independen, profesionalisme, dan integritas.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun BPK RI yang ke-72. Satukan energi, tingkatkan sinergi untuk BPK yang berprestasi. BPK Republik Indonesia kawal harta negara. ●

Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan

Saya Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengucapkan selamat ulang tahun BPK RI ke-72. Semoga BPK RI semakin berprestasi dan menjadi garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara. Satukan energi, tingkatkan sinergi untuk BPK yang berprestasi. BPK kawal harta negara. ●

J.B. Sumarlin
Ketua BPK RI Periode 1993-1998

Badan ini maju dan makin berperan di dalam pemberantasan korupsi. Memang tingkat korupsi kita masih tinggi. Mudah-mudahan, BPK bisa berperan penting. Untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Kinerja pemeriksaan dan pengawasan. Saya melihat dan mendengar sekarang, banyak peran BPK dalam pemberantasan korupsi. Saya juga gembira mendengar banyak kemajuan. Selamat kerja bagi BPK. ●

Anwar Nasution
Ketua BPK RI Periode 2004-2009

tokoh.id

Selama saya menjadi ketua BPK, berapa orang pejabat tinggi negara yang masuk penjara? Sebelumnya, tidak ada itu. Untuk mengatasi masalah korupsi itu, saya menyiapkan program-program yang pokoknya penyimpangan keuangan negara ya diperiksa. Saya tidak pakai orang luar. Saya pakai orang dalam.

Siapa saja yang masuk penjara? Gubernur BI, empat deputi gubernur, satu deputi senior, kepala Mahkamah Agung dilaporkan ke polisi. Gubernur, banyak. Siapa yang memasukkan mereka ke penjara? Bukan saya, saya hanya teken-teken saja. Tapi seluruh elemen BPK yang bekerja. Nah jadi di situ kemampuan BPK. Ini yang harus dimanfaatkan. Ini yang harus didorong.

Sekarang ini, kalau kita lihat, keuangan negara masih harus diperbaiki. Koruptor harus ditangkap. Kalau korupsi tidak dibereskan, maka hancur negara ini. Lihat saja sejarah dari sejak Nabi Adam, bangsa itu pasti hancur karena korupsi. Itu yang tidak boleh. Makanya, saya terus berharap agar BPK dapat semakin bagus. ●

Hadi Poernomo
Ketua BPK RI Periode 2009-2014

Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 BPK RI. Semoga menjadi makin jaya dan menjadi pengawal harta negara yang abadi. Aamiin. ●

Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI

Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK RI ke-72. Semoga BPK RI kedepannya semakin independen, profesional, dan berintegritas dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Satukan energi, tingkatkan sinergi untuk BPK yang berprestasi. BPK Kawal Harta Negara.

Saya menilai kinerja BPK selama ini sangat baik dan harus tetap dipertahankan. Harapan saya BPK harus lebih kuat lagi, independen, dan menjadi penguat DPR selaku pengawas pemerintah. BPK memberikan masukan, memberikan pemeriksaan yang kuat kepada DPR agar pengawasan DPR terhadap pemerintah berjalan lebih tertib dan pencapaian pengelolaan keuangan negara bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. ●

Oesman Sapta
Ketua DPD RI

Selamat ulang tahun BPK RI ke-72. Semoga BPK RI dapat melaksanakan tugasnya secara konsisten dan dapat menjalankan secara baik tugas-tugas sesuai dengan perintah undang-undang. ●

dpd.go.id

Oce Madril Ketua Pukat UGM

Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK RI yang ke-72. Semoga BPK RI semakin independen, profesional, dan berintegritas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi meningkatkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun. ●

Nila Farid Moeloek
Menteri Kesehatan

Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Kementerian Kesehatan RI yang senantiasa dapat membantu pelaksanaan tugas BPK dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah merasakan manfaat dalam bentuk masukan dan rekomendasi yang konstruktif. Sehingga kami dapat memperoleh predikat WTP 5 kali berturut-turut sejak tahun 2013. Selanjutnya, di tengah berbagai ujian dan rawannya gangguan integritas yang terjadi, semoga BPK RI semakin maju dan sukses sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

BPK RI sudah dipercaya sebagai auditor eksternal dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Hal ini menunjukkan eksistensi BPK RI untuk dapat berkiprah di level internasional.

Kami berharap BPK RI tetap dapat menjaga integritas, independensi, dan profesionalismenya. Satukan energi untuk BPK yang beprestasi. BPK Kawal Harta Negara. Dirgahayu BPK RI. ●

Nicke Widyawati
Direktur Utama
PT Pertamina (Persero)

Saya mengucapkan selamat ulang tahun BPK RI yang ke-72. Semoga BPK RI kedepannya semakin independen, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh negara. Satukan energi, tingkatkan sinergi untuk meraih prestasi. BPK kawal harga negara. ●

Sapto Amal Damandari
Wakil Ketua BPK RI
Periode 2014-2017

Selamat ulang tahun ke-72 buat BPK RI. Semoga tetap bermanfaat bagi bangsa dan negara dan selalu bisa mengawal harta negara. Doa kami, BPK lebih jaya, lebih makmur dan bisa mendukung Pemerintah Indonesia, DPR, dan seluruh *stakeholder* yang ada di Indonesia. ●

Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan

Saya menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang ke-72. Semoga seiring bertambah usia, BPK mampu menjadi mitra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintah yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan profesional, serta mendukung program prioritas Kementerian Pertahanan dalam mewujudkan industri pertahanan mandiri dan mewujudkan Indonesia makmur, maju, sejahtera. ●

Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri

Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPK RI ke-72. Semoga BPK RI kedepannya semakin independen, profesional dan berintegritas dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Satukan energi, tingkatkan sinergi untuk BPK yang berprestasi. BPK Kawal Harta Negara. ●

Mohammad Nasih
Rektor Universitas Airlangga

Kami segenap civitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-72 kepada BPK RI. Tentu BPK mempunyai visi yang detail dan penting untuk memastikan tujuan bernegara dan menyejahterakan rakyat akan dicapai.

Kami berharap BPK akan terus mendorong itu. Selamat ulang tahun ke-72 untuk BPK. Terus berikhtiar menjadikan rakyat Indonesia lebih sejahtera melalui misi BPK. ●

Fahmi Idris
Direktur Utama BPJS Kesehatan

Saya Fahmi Idris, izinkan saya dalam kesempatan ini turut menghaturkan ucapan selamat ulang tahun kepada BPK RI ke-72. Semoga BPK RI tetap jaya dan terus mengawal keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, Dirgahayu BPK RI ke-72. ●

FIPP Diharapkan Terus Hasilkan Standar Audit Berkualitas

Meski memiliki mandat yang berbeda, setiap SAI memiliki tujuan yang sama, yaitu, untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui audit.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum For INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP) ke-9 di Bali, 26 November 2018. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutannya berharap FIPP dapat terus menghasilkan standar audit yang berkualitas.

Moermahadi mengatakan, standar audit dibutuhkan karena masing-masing supreme audit institution (SAI) atau lembaga pemeriksa negara memiliki mandat yang berbeda, tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara. Akan tetapi, kata dia, SAI memiliki tujuan umum yang sama, yaitu untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui audit.

■ Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara membuka acara

Ia mengatakan, audit sangat penting meskipun hanya berada di belakang layar. ''Tetapi saya ingin menunjukkan kepada semua orang, bahwa audit SAI merupakan faktor penting dalam membuat perbedaan bagi kehidupan warga," ungkap Moermahadi.

Moermahadi menjelaskan, audit terhadap entitas pemerintah dan sektor publik oleh SAI memiliki dampak positif. Salah satunya untuk membantu meningkatkan kepercayaan di seluruh masyarakat. SAI, lanjut Moermahadi, dapat membantu proses ini melalui standar yang dapat memberikan nilai nyata dan terukur bagi sektor publik.

Meski begitu, Moermahadi mengingatkan butuh proses yang berkualitas agar SAI dapat memberikan dampak positif dan nyata kepada masyarakat. "Audit sektor publik membutuhkan proses yang berkualitas. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya standar audit," kata Moermahadi.

Oleh karena itu, Moermahadi menekankan agar forum tersebut dimanfaatkan SAI untuk meninjau, memperluas, dan menilai standar audit. Sebab, standar audit merupakan pedoman sistematis dan spesifik yang digunakan auditor keti-

■ Foto bersama delegasi FIPP

ka melakukan audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Khususnya, kata dia, untuk membantu memastikan akurasi, konsistensi, dan kemampuan verifikasi atas tindakan dan laporan auditor.

Moermahadi menuturkan, standar audit juga memainkan peran sentral dalam memastikan keseragaman proses dan metodologi audit. Audit yang memenuhi standar dapat dijadikan sebagai *benchmark* dan menjadi *best practice* baik secara lokal dan global untuk sektor publik maupun sektor swasta.

Dalam kesempatan tersebut, Moermahadi menceritakan bahwa pengembangan standar audit di BPK berada di bawah tanggung jawab Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Direktorat tersebut sangat memperhatikan berbagai standar audit dan panduan untuk tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

"BPK bertekad tetap berada di garis depan bersama FIPP untuk mengintegrasikan dan mengkomunikasikan informasi yang akan membantu auditor BPK," katanya. Moermahadi menambahkan, BPK sangat mengapresiasi upaya FIPP yang selama bertahun-tahun sangat fokus pada standar audit internasional yang dibuat INTOSAI.

■ Sambutan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam FIPP

Dalam mengembangkan standar-standar audit, tim melakukan berbagai studi, diskusi kelompok, dan membuat tolok ukur untuk standar audit lainnya, terutama dengan standar Internasional. Dia menegaskan, kerangka kerja INTOSAI menjadi referensi penting untuk menyiapkan standar dan pedoman audit bagi BPK. ●

> BPK bertekad tetap berada di garis depan bersama FIPP untuk mengintegrasikan dan mengkomunikasikan informasi yang akan membantu auditor BPK.

BPK Ikut Berikan Pelatihan Pemeriksaan Lingkungan di India

BPK sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA mengirimkan dua orang pemeriksa sebagai *trainer*.

Kapabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkup internasional semakin diakui. BPK kembali berpartisipasi dalam pelatihan pemeriksaan lingkungan. Kali ini, BPK ikut terlibat dalam penyelenggaraan International Training Programme (ITP) on Introduction of Environmental Auditing yang digelar di International Center for Environmental Audit and Sustainable Development (iCED) di Jaipur, India, akhir tahun lalu.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu program INTOSAI WGEA (International Organization of Supreme Audit Institutions The Working Group on Environmental Auditing) yang diselenggarakan setiap tahun bekerja sama dengan SAI India. Pelatihan ini bertujuan membekali para pemeriksa tentang cara melakukan pemeriksaan lingkungan yang efektif dengan mengacu pada modul pelatihan yang diterbitkan training INTOSAI WGEA, yaitu mengenai *auditing water*, *climate change*, *biodiversity*, *assessments*, *and waste*.

BPK sebagai Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA mengirimkan dua orang pemeriksa sebagai *trainer*, yaitu Amri Lewa dan Khairil Anwar. Pelatihan tersebut digelar pada 26 November sampai 8 Desember 2018 dan diikuti oleh 24 peserta dari 14 SAI.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara sebagai Ketua INTOSAI WGEA hadir dalam *valediction programme* dan memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Moermahadi menekankan, kegiatan kunci INTOSAI WGEA adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, Moermahadi sangat mengapresiasi inisiatif SAI India dalam menyelenggarakan pelatihan tahunan tersebut.

"Pemeriksaan lingkungan adalah kegiatan utama di sebagian besar SAI. Ada berbagai topik yang jadi fokus antara lain air, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, limbah, dan perjanjian lingkungan internasional," ucap Moermahadi.

Pemeriksaan itu, kata Moermahadi, memiliki dampak signifikan pada pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Moermahadi, INTOSAI WGEA dapat secara langsung menghubungkan hasil lingkungan yang positif dengan input dan dampak pemeriksaan lingkungan. Apalagi, INTOSAI WGEA telah berhasil memfasilitasi pengembangan pemeriksaan lingkungan sejak 1992.

■ Sambutan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam kegiatan ITP di India

Dia menambahkan, keanggotaan, kegiatan, dan jaringan INTOSAI WGEA juga tumbuh secara signifikan. Dia menjelaskan, banyak SAI telah bekerja sama mengembangkan alat pemeriksaan yang canggih demi memenuhi persyaratan kebijakan publik. Moermahadi menuturkan, SAI memenuhi peran INTOSAI WGEA dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan, membangun kapasitas dan kompetensi, dan mengekspresikan visi positif di masa depan. "Pada akhirnya, pemeriksaan lingkungan yang berkelanjutan untuk kemajuan kita semua," kata dia.

INTOSAI WGEA memiliki mandat untuk meningkatkan informasi dan melakukan pelatihan pemeriksaan lingkungan. Membangun kapasitas SAI melalui pertukaran informasi dan pelatihan, tegas Moermahadi, memang menjadi kegiatan inti WGEA. Survei terbaru menunjukkan, salah satu harapan utama anggota INTOSAI WGEA adalah menerima pelatihan tentang pemeriksaan lingkungan.

Oleh karena itu, kata Moermahadi, merupakan hal yang menyenangkan jika iCED sebagai fasilitas pelatihan global, berpartisipasi dalam menyukseskan pelatihan ini. Berbagai program pelatihan pemeriksaan lingkungan telah dilakukan di fasilitas ini dengan dukungan dari anggota INTOSAI WGEA sebagai pelatih dan menggunakan materi pelatihan INTOSAI WGEA.

"Sebagai Ketua INTOSAI WGEA, saya bangga melihat produk dan sumber daya WGEA telah digunakan dan dirujuk oleh komunitas SAI demi meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pemeriksaan lingkungan," ungkapnya. ●

IDA SUNDARI
INSPEKTUR UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bertekad Tingkatkan Tata Kelola

Perjalanan Ida Sundari di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat panjang dan penuh perjuangan. Memulai karier sebagai staf di biro umum, Ida kini telah menjadi Inspektur Utama.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Ida menceritakan perjuangannya di BPK dan target-targetnya setelah dilantik menjadi Inspektur Utama sejak Maret 2018. Berikut petikan wawancaranya:

■ Ida Sundari

Sejak kapan bekerja di BPK? Bagaimana kisah Ibu dalam meniti karier di BPK?

Saya bekerja di BPK sudah cukup lama. Sejak tahun 1980. Ketika saya lulus SMA, setahun berikutnya saya melamar di BPK. Alhamdulillah lulus. Saat itu saya ditempatkan di Biro Umum. Kemudian tahun 1981 saya kuliah di Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama) jurusan ekonomi perusahaan untuk mendapatkan gelar S1, kemudian dilanjutkan kuliah Pasca Sarjana jurusan manajemen tahun 1999. Selama masa saya kuliah, saya diminta oleh Sekretaris Jenderal -Pak Soedjito Sindhumihardjo- untuk menjadi stafnya. Menjadi staf Sekjen memberi saya banyak kesempatan untuk belajar berbagai hal termasuk penatausahaan surat dan pengelolaan keuangan.

Setelah lulus S1 saya mengikuti ujian dinas penyesuaian golongan menjadi III/a, kira-kira 3 tahun setelah itu saya naik Golongan III/b melalui kenaikan pangkat istimewa dan saya diangkat menjadi Plt. Kasubbag Sekjen. Saya bekerja di Sekretariat Jenderal kurang lebih 21 tahun dengan penggantian enam kali Sekretaris Jenderal.

Tahun 2001, saya promosi menjadi Kabag Penyelenggaraan di Pusdiklat. Kira-kira 5 tahun pada jabatan tersebut, saya mutasi menjadi Kabag Bina Program. Satu tahun setelah itu, karena adanya perubahan SOTK, saya kembali mutasi menjadi Kabag Kesekretariatan Pusdiklat, dan melaksanakan tugas tersebut selama 3 tahun.

Selanjutnya, saya promosi Eselon II sebagai Inspektur I di Inspektorat Utama. Pada Inspektorat Utama terdapat Inspektorat I, II dan III yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dan hanya dibedakan pada wilayah kerja. Kemudian dengan pertimbangan spesialisasi, tiga Inspektorat pada Inspektorat Utama menjadi Inspektorat PKMP, PIMK, dan PI. Dengan adanya perubahan SOTK tersebut, saya menjadi Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan (PIMK). Sebagai pengawas internal saya menangani kegiatan reviu dan pemeriksaan internal atas kegiatan yang dilaksanakan satker yang ada di BPK.

Setelah 4 tahun sebagai pengawas internal, saya dimutasi sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai penugasan baru di daerah, awalnya saya sedikit was-was karena jauh dari keluarga, tapi akhirnya saya merasa senang karena di daerah tidak ada kemacetan dan tingginya rasa kekeluargaan antara sesama pegawai di Kantor Perwakilan.

Saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan hanya 1 tahun 5 bulan karena saya mengikuti *bidding* sebagai Eselon I. Alhamdulillah saya lulus, dan akhirnya saya menjadi Inspektur Utama dari bulan maret 2018 sampai saat ini.

Apa yang menjadi motivasi ibu selama bekerja di BPK?

Bekerja di BPK merupakan kebanggaan bagi saya karena BPK merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai pegawai BPK, saya berharap dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Secara khusus sebagai Inspektur Utama (Irtama) ingin sekali dapat berperan sebagai *leading by example* dengan mendorong tata kelola internal, sehingga BPK dapat lebih baik lagi ke depannya.

Apa suka dan duka selama bekerja di BPK? Apa saja tantangan dari setiap jabatan yang diemban?

Setiap jabatan pasti ada perbedaan, terutama dari sisi tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan, pasti tanggung jawab semakin berat. Saat menjadi Kepala Perwakilan, saya senang sekali dengan pegawai di sana karena rasa kekeluargaan yang sangat kental. Saya juga bisa memperluas *networking* saya dengan mengenal lebih dekat para pejabat di daerah. Sedangkan dukanya, sangat terasa pada saat melakukan tugas pemeriksaan, karena sulitnya akses ke daerah/entitas yang menjadi objek pemeriksaan. Apalagi di Pontianak, terkadang kabut membuat pesawat tak bisa terbang. Sementara,

■ Ida Sundari

kalau lewat darat membutuhkan waktu 8-12 jam.

Sebagai Irtama, sangat menyenangkan dapat berperan aktif untuk membantu satker mengidentifikasi permasalahan yang dapat mendorong peningkatan kinerja. Namun hal tersebut tidaklah mudah karena proses identifikasi permasalahan kadang dilihat sebagai sesuatu yang negatif dan seolah "menyalahkan" satker. Hal lain yang juga membuat saya sedih adalah saat menyerahkan hasil penelitian pelanggaran disiplin pegawai kepada Sekjen untuk ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Kita berharap bisa meningkatkan tata kelola pemeriksaan lebih baik.

Semua kesulitan atau hal-hal yang tidak mudah dalam mengemban jabatan tersebut merupakan tantangan yang mendorong saya untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja organisasi yang saya pimpin.

Saat menjadi Kepala Perwakilan, bagaimana Ibu menyesuaikan diri dengan kultur dan budaya di sana? Lalu, apa pengalaman unik ketika bekerja di daerah?

Kunci dari penyesuaian diri dengan kultur dan budaya dimana kita bertugas adalah komunikasi. Saat akan melakukan pemeriksaan, saya usahakan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kepala Daerah. Saya selalu menyampaikan kepada Kepala Daerah bahwa saya dan tim akan melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan. Saya juga secara tegas menyampaikan agar pemerintah daerah tidak memberikan fasilitas apapun, karena seluruh tim pemeriksa telah memperoleh fasilitas dari BPK. Apabila ada salah satu pegawai BPK yang meminta fasilitas harap diberitahukan kepada saya.

Selain itu sebagai bentuk komunikasi dengan pemerintah daerah, setiap enam bulan sekali ada pertemuan dengan para Inspektorat dan juga ada pertemuan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan pertemuan yang cukup sering maka koordinasi menjadi lebih mudah. Dan saya juga menyesuaikan diri dengan mengucapkan salam "Adil ka' talino Bacuramin ka' saruga, Basengat ka' jubata", yang artinya adil terhadap sesama manusia, bercermin ke surga dan bernafas dengan nama Tuhan.

Apa yang menjadi fokus Ibu sebagai Itama?

Tugas Inspektorat Utama (Itama) melakukan pengawasan. Pengawasan itu termasuk pemeriksaan internal dan *review*. Jadi, Itama melakukan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satker di BPK termasuk me-*review* pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh AKN, baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu Itama juga melakukan *review* atas konsep Laporan Keuangan BPK sebelum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Satu lagi, kita melakukan aktivitas penegakan integritas. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana budaya dan perilaku pegawai melalui implementasi nilai-nilai dasar dan kode etik. Apalagi, dalam penilaian *Capabilitas Internal Audit* dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM) Itama sudah mendapat level 3 (integrasi). Itama melakukan *review* terintegrasi yang merupakan *review* gabungan

dari tiga inspektorat yaitu PKMP, PIMK, dan PI. *Review* tersebut melihat aspek kualitas kinerja pemeriksaan, kualitas kelembagaan, dan perilaku pegawai yang mendukung proses pemeriksaan dan aktivitas kelembagaan.

Apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk memperkuat manajemen risiko dan zona integritas?

Alhamdulillah tingkat kapabilitas Itama telah mencapai level 3 dalam IACM. Tahun ini, kita juga menginisiasi zona integritas dan *risk management*. *Risk management* merupakan hal yang baru karena sebelumnya tidak terdapat tata kelola *risk management* yang terstruktur. Akhirnya kita membuat tim *ad hoc* dan merumuskan kebijakan dan pedoman implementasi manajemen risiko. Tanggal 25 September 2018 sudah ditandatangani piagam manajemen risiko baik untuk BPK, Eselon I maupun Eselon II.

Selain ini Itama juga menginisiasi pembangunan zona integritas. Alhamdulillah, sejak mulai pencanangan pada Tahun 2013, sampai saat ini sudah 12 satuan kerja yang dapat predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), yaitu Kantor Perwakilan Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Banten, DIY, Aceh, Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Badan Diklat (Badiklat), serta 1 WBBM (Wilayah Bebas Bersih dan Melayani), yaitu Badiklat. Diharapkan setiap tahun lebih banyak satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM.

Tantangan dari implementasi manajemen risiko dan pembangunan zona integritas adalah Itama harus dapat berperan sebagai *leading by example* dengan meningkatkan implementasi manajemen risiko dan penguatan integritas di internal Itama. Karena itu, Itama mempersiapkan diri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi penilaian IACM pada tahun 2019, di tahun 2020 mulai mempersiapkan diri untuk mencapai level 4, diharapkan Itama dapat mencapai IACM level 4 pada tahun 2021.

Inovasi apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan manajemen risiko? Adakah kendala dalam penerapannya?

Kita sudah memiliki perangkat lunak yaitu kebijakan dan pedoman manajemen risiko. Itama sebagai inisiator untuk melaksanakan implementasi manajemen risiko menjadi bagian dari proyek percontohan bersama Biro TI, Auditorat II.A, Badiklat dan satker Perwakilan yang mendapat WBK.

Dalam proyek percontohan tersebut satker diberikan *awareness* melalui diseminasi cara mengiventarisasi risiko yang ada dan mendesain rencana mitigasi serta proses monitoring yang akan dilakukan oleh Itama.

> Saat akan melakukan pemeriksaan, saya usahakan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala daerah.

Kendala dalam penerapan manajemen risiko adalah belum terstrukturnya pelaksana manajemen risiko di masing-masing satker, untuk itu telah diusulkan perubahan SOTK yang mengakomodasi tugas terkait implementasi manajemen risiko.

Terkait Reformasi Birokrasi, kebijakan atau program apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh BPK?

Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan dalam pengembangan Reformasi Birokrasi di BPK. Kedepannya ada dua yang perlu ditindaklanjuti. Pertama terkait penerapan manajemen risiko. Kedua efektivitas, implementasi, pengukuran kinerja individu yang sedang dikembangkan oleh Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang). Kedepannya indikator kinerja individu akan menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja. Selain dua hal itu, BPK perlu meningkatkan transparansi pada pola mutasi dengan menggunakan *dashboard* yang dapat memberikan informasi secara dini kepada para pegawai tentang pola mutasi yang akan dijalaninya selama berkarir di BPK.

Apa harapan Ibu terkait pemeriksaan BPK?

Harapan saya, BPK bekerja sesuai dengan visinya. Kita bisa jadi pendorong untuk tata kelola yang baik melalui hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan berkualitas.

Kegiatan apa yang sering Ibu lakukan untuk mengisi waktu luang?

Untuk mengisi waktu luang, saya sering melakukan olahraga dan *traveling*. Dulu, waktu kecil beberapa cabang olahraga saya ikuti, seperti karate dan pemandu senam. Sekarang karena sudah tidak boleh melakukan olahraga berat lagi, saya hanya berenang dan bersepeda. Tapi kalau waktunya agak banyak, biasanya saya sama suami jalan-jalan atau mengunjungi anak-anak saya. Anak-anak saya kan di daerah, ada yang tinggal di Pontianak, Madiun, dan Semarang. Terkadang juga jalan-jalan melihat tempat-tempat bersejarah.

Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda di BPK?

Untuk generasi muda ini, saya melihat mereka pintar-pintar dan memiliki potensi yang baik. Mereka juga sangat andal dalam hal teknologi informasi dan inovasi-inovasi baru. Saya harap mereka dapat menanamkan nilai-nilai dasar BPK, sehingga bisa terlihat dari tingkah, perilaku, dan sikap mereka. ●

ABDUL GAFAR USMAN
KETUA BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Perkuat Sinergi dengan Berbagai Pihak

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menyimpan harapan yang besar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini genap berusia 72 tahun. Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman berpesan agar BPK dapat terus melakukan peningkatan dalam beberapa hal. Namun, ia juga berjanji BAP DPD RI akan terus bekerja sama dengan BPK dalam mengawal keuangan negara.

Berikut petikan wawancaranya dengan *Warta Pemeriksa*.

BPK genap berusia 72 tahun pada 1 Januari 2019. Apa harapan bapak terhadap BPK di usianya yang ke-72?

Pertama-tama kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-72 BPK RI. Harapan kami agar BPK RI dalam mengawal pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, semakin solid, terpercaya, berkomitmen tinggi, dan tetap konsisten sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional.

Selain itu, diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi bersama DPD RI, termasuk dengan BAP DPD RI, dalam upaya mendorong peningkatan kualitas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan lainnya.

Mekanisme reviu internal oleh BPK perlu semakin diekstensifkan, sehingga isi rumusannya memberikan instruksi yang tegas kepada *auditee* dan tidak menimbulkan penafsiran ganda untuk ditindaklanjuti serta mampu meminimalisasi keterulangan temuan yang sama. BPK juga perlu terus meningkatkan pengawasan mutu hasil pemeriksaan. Tujuannya guna menjamin standarisasi rekomendasi dan konsistensi penyajian angka temuan/rekomendasi dan penindaklanjutannya.

Yang tak kalah penting, BPK mengintensifkan pemeriksaan terkait penerimaan negara melalui pajak, terutama atas permintaan DPR RI/DPD RI karena dugaan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dipandang dapat merugikan penerimaan keuangan negara. Caranya, dengan mengefektifkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan bila dipandang perlu untuk menjamin kelancarannya. Lalu, mengusulkan peninjauan kembali atas sejumlah ketentuan dalam undang-undang terkait.

Bagaimana sinergi BAP DPD RI dengan BPK RI selama ini untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah?

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, sinergitas antara BAP DPD RI dan BPK RI telah berjalan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, respons positif BPK RI terkait dengan kegiatan kunjungan kerja BAP DPD RI dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK terhadap Pemerintah Daerah. Kedua, BPK Perwakilan memfasilitasi berupa dukungan data hasil audit serta memberikan klarifikasi atas pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan penyelesaian/pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI.

Ketiga, dipenuhinya permintaan DPD RI oleh BPK RI terkait pelaksanaan pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sehubungan dengan hasil analisis BAP DPD RI atas permasalahan di daerah.

Menurut Bapak, seberapa penting peran BPK dalam mengawal akuntabi-

■ Abdul Gafar Usman

litas keuangan daerah dan kemajuan pembangunan daerah melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan?

Jelas sangat penting karena merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23E UUD 1945. Bunyi pasal tersebut adalah, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, juga tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK RI sebagaimana telah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654.

Apa yang menjadi fokus BAP saat ini?

Yang menjadi *concern* BAP DPD RI saat ini adalah BAP DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus juga sebagai representasi daerah, menghendaki agar pembangunan di daerah tidak lepas dari pengawasan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/ daerah. Kami juga mendesak segenap jajaran pemerintahan (eksekutif) untuk menaruh perhatian yang serius

> BPK juga perlu terus meningkatkan pengawasan mutu hasil pemeriksaan. Tujuannya guna menjamin standarisasi rekomendasi dan konsistensi penyajian angka temuan/rekomendasi dan penindaklanjutannya.

dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, tidak hanya dalam bentuk pemberian jawaban penjelasan (konseptual) atau langkah-langkah formalitas, melainkan juga pengambilan tindakan korektif yang nyata sehingga langkah-langkah perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Lalu, untuk menyikapi fenomena sejumlah entitas/pejabat yang dengan sengaja menghindarkan diri dari pemeriksaan/menindaklanjuti rekomendasi BPK, maka ketentuan dalam Pasal 26 UU No 15 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2017 perlu ditegakkan oleh BPK.

■ Abdul Gafar Usman

dpd.go.id

> Jika temuan BPK RI memang terindikasi merugikan negara, maka sesuai tenggang waktu yang diberikan segera dikembalikan kepada negara.

BAP DPD RI *concern* terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara, sehingga BAP menganggap perlu menambahkan prosentase tindak lanjut atas rekomendasi yang bernilai rupiah di samping prosentase tindak lanjut dalam jumlah rekomendasi baik atas tindak lanjut oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN, dan badan lainnya. Kami juga mengefektifkan peran Tim Tindak Lanjut (TTL) dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D).

Salah satu tugas BAP adalah melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi merugikan negara. Temuan apa saja yang telah atau yang sedang ditindak lanjuti BAP?

Temuan-temuan yang telah dan akan dilakukan oleh BAP DPD RI tidak hanya yang terkait dengan hasil pemeriksaan keuangan dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap pemerintah daerah, tetapi juga terhadap lembaga/kementerian di tingkat pemerintah pusat. Seperti tindak lanjut hasil Pemeriksaan atas penyaluran dan pemanfaatan Dana BOS, pembangunan infrastruktur jalan Pantai Utara Jawa, penyelenggaraan program JKN/BPJS Kesehatan, TVRI, dan terakhir terkait dengan subsidi energi listrik melalui PLN.

Bagaimana cara BAP menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan?

Sesuai dengan UU, hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD. Oleh DPD ditindaklanjuti melalui dua alat kelengkapan yaitu BAP DPD RI dan Komite IV DPD RI. Hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi merugikan negara, ditindaklanjuti oleh BAP DPD RI, sedangkan hasil pemeriksaan BPK RI yang hasilnya untuk memberikan pertimbangan kepada APBN ditindak lanjuti oleh Komite IV.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh BAP DPD RI dilaksanakan setelah dilakukan analisis atas temuan BPK RI. Kemudian, BAP DPD RI akan menentukan dari dua sisi, yaitu sisi yang pertama objek yang diperiksa serta subjek yang akan dibahas. Oleh karenanya BAP melakukan analisis dengan cara turun langsung ke daerah/ Kunjungan Kerja (Kunker) sebagai objek pemeriksaannnya. Setelah itu, mengadakan pertemuan/ rapat kerja (Raker) dengan BPK RI Perwakilan setempat dan pemerintah daerah serta memberikan tiga saran kepada pemda.

Jika temuan BPK RI memang terindikasi merugikan negara, maka sesuai tenggang waktu yang diberikan segera dikembalikan kepada negara. Jika milik daerah, maka dikembalikan ke daerah. Kemudian jika memang belum dapat dikembalikan, maka kami memberi tenggat waktu kepada kepala daerah kapan mereka bisa mengembalikan. Komitmen inilah yang akan kami pantau agar kedepannya predikat opininya meningkat.

Pilihan terakhir, apabila tidak bisa mengembalikan, disinilah peran BAP untuk memfasilitasi kepada instansi terkait, baik dengan BPK RI sendiri maupun terperiksa ihwal ketidak mampuan daerah untuk menindaklanjutinya, apa alasannnya? Apakah alasan regulasi, apakah alasan itu sifatnya implementasi UU atau ada benturan atau hal-hal lain yang memang tidak diketahui pemda.

Apabila ternyata semua tidak bisa, maka kami akan mengadakan Rapat Konsultasi dengan BPK RI. Jika hal ini terkait regulasi/ perundangan maka BAP DPD RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian terkait. ●

Asyiknya Bertugas di Gorontalo

Ada begitu banyak destinasi wisata yang masih alami dan bisa diandalkan sebagai tempat melepas penat setelah menjalani rutinitas pekerjaan.

■ Petak sawah di tengah Kota Gorontalo

■ Krishna Pambudi

■ Pantai Libuo, Gorontalo

Krishna Pambudi tak menemukan kendala berarti sejak ditugaskan menjadi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Sebaliknya, ia menemukan begitu banyak hal unik dan mengasyikkan selama melakukan pemeriksaan di sana.

Ia menceritakan, Gorontalo merupakan provinsi yang aman dengan tingkat kriminalitas rendah. "Suasananya kondusif, jarang sekali terdapat konflik. Dan di Gorontalo itu aman. Bisa dikatakan, kriminalitas seperti pencurian sangat rendah," Ujar Krishna kepada *Warta Pemeriksa*.

Krishna memulai perjalanannya sebagai auditor di Gorontalo sejak 2015. Sebelumnya, ia bertugas di Auditorat Utama Keuangan Negara selama 5 tahun.

Kondisi medan yang dihadapi di Gorontalo saat melakukan pemeriksaan, sebagian besar adalah pedesaan. Hal yang unik, kata Krishna, masih banyak petak-petak sawah atau ladang berkebun di tengah kota. Pertanian memang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bagi daerah hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000 tersebut.

Meskipun kondisi geografis di Gorontalo sebagian besar merupakan perbukitan, suhu udara di sana cukup panas. Kata Khrisna, teriknya cuaca menjadi salah satu tantangan bagi pendatang. Jika tak terbiasa dengan cuaca panas, seseorang akan merasa tidak nyaman dalam beraktivitas di luar ruangan.

"Provinsi Gorontalo terletak di dekat garis khatulistiwa. Sehingga kondisi suhu udara di sana cukup panas dan mungkin akan membuat tidak nyaman bagi beberapa orang yang belum beradaptasi dan terbiasa. Akan tetapi, suasana Gorontalo itu tenang dan aman. Walaupun suhu udara cukup panas, tapi udaranya masih bersih karena belum banyak polusi," ujar dia.

Dari segi infrastruktur, akses jalan cukup menunjang proses pemeriksaan. Menurut Krishna, akses jalan di sana cukup baik dan mudah untuk dilalui. Bahkan, dia mengatakan, sampah juga jarang ditemukan berserakan di jalan.

"Infrastruktur khususnya jalan aspal di Gorontalo sudah dapat diakses, terutama sampai ke kecamatan bahkan desa. Hanya beberapa tempat yang kondisi jalannya masih berupa tanah atau batu."

Banyaknya jenis kuliner nan nikmat juga membuat Krishna merasa betah bertugas di Gorontalo. Ia mengaku sudah mencoba berbagai masakan khas di sana. Salah satunya adalah Binte Biluhuta yang memiliki arti jagung siram. Makanan itu jadi kuliner khas karena Gorontalo merupakan salah satu provinsi penghasil jagung.

"Racikannya sendiri terdiri dari jagung dicampur dengan parutan kelapa, udang dan suwiran ikan cakalang, kemudian disiram dengan kuah berbumbu rempah-rempah khas Gorontalo," tutur Krishna.

Tak hanya itu, hasil laut seperti ikan juga sangat melimpah, khususnya ikan tuna dan ikan nike. Oleh karena itu, masyarakat Gorontalo kerap mengolah makanan dengan bahan dasar kedua ikan tersebut. Salah satu makanan olahan ikan tuna dan ikan nike yang khas yaitu sate tuna dan perkedel ikan nike.

"Tidak hanya dioleh menjadi sate, olahan tuna lainnya yang merupakan khas Gorontalo ada tuna bumbu woku, dada tuna bakar, sup ikan tuna yang nikmat dan segar," Kata Krishna.

Provinsi Gorontalo terletak di dekat garis khatulistiwa. Sehingga kondisi suhu udara di sana cukup panas dan mungkin akan membuat tidak nyaman bagi beberapa orang yang belum beradaptasi dan terbiasa.

Destinasi wisata

Yang membuat Krishna semakin jatuh hati kepada Gorontalo adalah destinasi wisatanya. Ada begitu banyak destinasi wisata yang masih alami dan bisa diandalkan sebagai tempat melepas penat setelah menjalani rutinitas pekerjaan. Pemandangan yang disajikan pun sangat menarik dengan berbagai keunikan yang dimiliki oleh setiap lokasi.

Di Provinsi Gorontalo, ada sebuah pantai bernama Pantai Olele yang terletak di di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango. Pantai tersebut menawarkan wisata bawah laut bagi wisatawan yang gemar *snorkeling* karena memiliki biota laut yang sangat indah dan terumbu karang yang unik.

Ada juga destinasi wisata favorit lainnya, yaitu Pulau Saronde atau Ponelo di Kabupaten Gorontalo Utara, hingga Pulau Cinta di Kabupaten Boalemo.

"Di Kabupaten Pohuwato ada Pantai Pohon Cinta. Dan yang terbaru adalah Pulau Lahe sebagai destinasi wisata selam dengan spot menarik." ujarnya.

Mengutip informasi dari laman resmi Pemprov Gorontalo, destinasi menarik lainnya adalah desa yang ditempati Suku Bajo. Letaknya di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Perkampungan Suku Bajo memiliki daya tarik untuk menjaring wisatawan. Tinggal di rumah Suku Bajo, ikut melaut lalu menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Taulo, Kecamatan Mananggu atau melihat bagaimana cara Suku Bajo membudidayakan lobster dan sejumlah ikan di tambak terapung, bisa menjadi kegiatan menarik buat wisatawan yang biasa hidup di perkotaan. Belum lagi budaya masyarakat Suku Bajo, seperti perkawinan dan acara selamatan. Dalam adat perkawinan masyarakat Suku Bajo, pasangan suami-istri yang baru menikah di lepas ke laut dengan perahu.

Di desa ini juga terdapat Pantai Bajo yang landai. Perairan Pantai Bajo ini menawarkan wisata *diving*. Masyarakat setempat pun ramah kepada wisatawan. Termasuk bila wisatawan ingin menginap di rumah mereka. ●

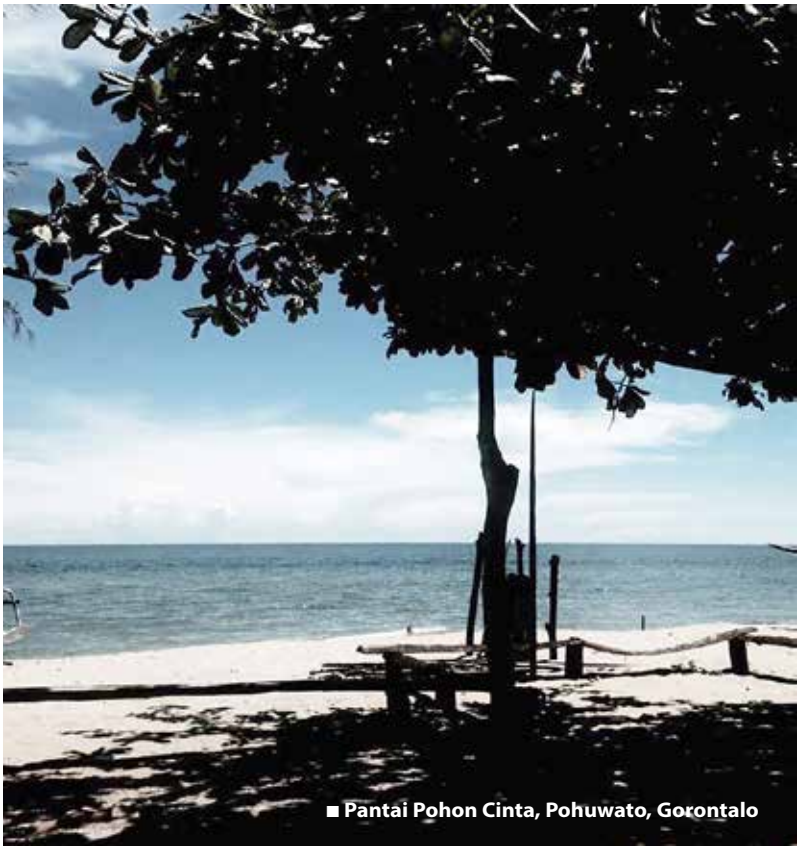

■ Pantai Pohon Cinta, Pohuwato, Gorontalo

■ Cek fisik bangunan di Marisa, Pohuwato, Gorontalo

■ Cek fisik jalan di Popayato Barat, Gorontalo

Menangkap Peluang Tren Bisnis Kopi

Semua produk minuman kopi KupangKoe memanfaatkan biji kopi dari petani lokal.

■ Karyadi di Kedai KupangKoe, Kantor BPK Pusat

■ Produk kopi KupangKoe

■ Produk kopi KupangKoe

Kopi tak lagi menjadi minuman yang identik dengan para orang tua. Jenis kopi yang semakin variatif, membuatnya turut dijadikan sebagai minuman favorit oleh generasi muda. Kafe-kafe dengan menu andalan kopi begitu mudah ditemukan di mana-mana. Kedai kopi berlomba-lomba menawarkan cita rasa kopi khas Indonesia dari berbagai daerah di Tanah Air.

Semakin tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap kopi membuat pegawai BPK Kalimantan Utara, Karyadi, memberanikan diri membuka bisnis kopi. Ia melihat ada peluang yang begitu besar dari bisnis kopi.

Karyadi memulai usaha kedai kopi saat menjadi Kepala Sub Auditorat di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kala itu, ia melihat potensi kopi di NTT cukup bagus. Salah satunya kopi Manggarai, kopi asal Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kopi jenis arabika dan robusta di daerah itu dinobatkan sebagai kopi terbaik Indonesia 2015.

"Jadi saya melihat pasar di sana, pangsa potensi dan sumber daya alamnya yang begitu luar biasa. NTT sangat kaya rempah-rempah, salah satunya kopi. Saya sendiri terjun langsung di sana," kata Karyadi kepada *Warta Pemeriksa*.

Akhirnya pada tahun 2016, ayah tiga orang anak itu memberanikan diri untuk membuka kedai kopi yang dinamakan KupangKoe. Lokasi kedai kopinya berada di daerah Kupang Kota. Ia menyulap kedai kopinya bernuansa *cozy* ala anak muda dan menyajikan *live music*.

Nama KupangKoe diambil dari kata "Kupang" dan "Koe" yang merupakan kode bandara Kupang. "*Alhamdulillah* merek ini sudah saya patenkan di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah *certified license*. Saya juga sudah mengurus izin PIRT (produk industri rumah tangga). Jadi, saya *gak* main-main dalam arti saya menekuni juga bisnis ini," ucap dia.

■ Karyadi

Seiring berjalannya waktu, Karyadi terpaksa menonaktifkan bisnis kedai kopinya yang berada di Kupang ketika ia dipindahtugaskan ke Jakarta. Akan tetapi, hal tersebut tak membuat antusias dan tekadnya dalam bisnis kopi menghilang.

Di Jakarta, Karyadi tetap meneruskan bisnis kopi KupangKoe-nya itu. Ia membuka beberapa cabang di Jakarta, termasuk di kantin BPK Pusat.

Semua produk minuman kopi KupangKoe memanfaatkan biji kopi dari petani lokal. Menurut Karyadi, kualitas biji kopi di Indonesia lebih baik daripada biji kopi negara lain.

Karyadi memang cukup totalitas dalam menjalankan bisnis kopinya. Sebab, ia me-*roasting* biji kopinya sendiri untuk digunakan di kedai kopi miliknya. Bagi dia, hal itu jadi pembuktian bahwa ia adalah pecinta kopi sejati.

"Jadi ini memang saya bisnisnya bukan hanya kedainya tapi saya juga diversifikasi, saya mulai *green bean*. Trus saya *roasting* sendiri karena saya punya alatnya. Jadi dari mulai biji mentah, saya ambil dari petani-petani lokal," katanya.

Biji kopi yang digunakan di kedai kopi miliknya sangat beragam, antara lain kopi Gayo, Puntang, malaba, Papua, dan Toraja. Ciri khas dari kedai kopinya adalah *single origin*. Karyadi mempertahankan cita rasa biji kopi yang akan disajikan kepada pelanggan.

Harga kopi KupangKoe bervariasi. Untuk kopi *single origin*, harganya di kisaran Rp21 ribu hingga Rp38 ribu per *cup*. Sedangkan espresso sekitar Rp23 ribu-Rp42 ribu, americano Rp20 ribu-Rp36 ribu, dan coffee latte atau cappuchino Rp25 ribu-Rp42 ribu. Variasi harga merujuk dari jenis biji kopi yang diinginkan.

"Saya bergerak di *single origin*. Segmen utamanya itu. Saya *gak* mau *blend*. Misalnya, kopi Gayo saya campur dengan biji kopi lain untuk membuat karakter sendiri, saya tak mau seperti itu," ujar dia.

Ia mengakui, persaingan bisnis di industri kopi sangat ketat. Akan tetapi, ia yakin inovasi-inovasi yang ia lakukan dapat berbuntut pada kesuksesan.

Ketika ditanya berapa modal awal dan omzet yang dihasilkan per bulan, Karyadi enggan untuk menjawab. Menurutnya, hasil dari bisnis kedai kopi ini cukup membuat dirinya tersenyum lebar.

"Kalau prospek saya masih yakin dan optimis. Bahkan dengan inovasi-inovasi saya, insya Allah, bisa bertahan."

Selain kedai kopi dan menjual hasil *roasting*, Karyadi mengembangkan bisnisnya tersebut dengan menciptakan pengharum ruangan beraroma kopi. Ide untuk membuat produk olahan itu terinspirasi dari sang istri.

"Parfum kopi ini bisa digunakan di mobil dan di ruangan. Fungsinya ada dua, yaitu sebagai penyerap bau dan sebagai pewanginya," katanya.

Karyadi mengatakan penggunaan media sosial sangat efektif dalam pengembangan bisnis kopinya. Karyadi mengunggah semua produknya di instagram @kopikupangkoe.

Karyadi tidak memasang target muluk-muluk dalam menjalankan bisnis kopi. Bagi dia, hal yang terpenting dalam berwirausaha adalah komitmen dan konsistensi.

Ia juga berpesan kepada anak muda, khususnya pegawai BPK, untuk tak takut menjalankan bisnis. "Jangan tunggu pensiun untuk mulai berwirausaha," katanya. ●

■ Aplikasi konsultasi hukum *online*

Laporan hasil pemeriksaan BPK yang terbebas dari kesalahan hukum merupakan tanggung jawab bersama semua unsur dan semua unit organisasi di BPK.

Konsultasi Hukum Menggunakan Aplikasi *Online*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan inovasi untuk mempermudah para pemeriksa dalam melakukan proses pemeriksaan. Pada Desember 2018, BPK meluncurkan Aplikasi Konsultasi Hukum Online yang merupakan salah satu modul dalam sistem manajemen hukum di BPK.

Sesuai namanya, aplikasi tersebut memuat layanan berupa konsultasi hukum dan *database* peraturan yang akan terus dikembangkan. Dengan adanya Aplikasi Konsultasi Hukum Online, pemeriksa bisa dengan cepat meminta pendapat hukum selama melakukan proses pemeriksaan.

Kepala Seksi Konsultasi Hukum Keuangan Pusat Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK, Muh Najib, menjelaskan, Ditama Binbangkum memang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan konsultasi hukum bagi internal BPK.

''Jadi, kalau ada pemeriksa menemukan masalah-masalah hukum, baik pada tahap pelaksanaan maupun pelaporan, mereka bisa berkonsultasi kepada Ditama Binbangkum," kata Najib kepada *Warta Pemeriksa*.

Sebelum adanya aplikasi *online*, konsultasi

■ **Wakil Ketua BPK dan Eselon I BPK dalam acara *launching* aplikasi konsultasi hukum *online***

hukum dilakukan secara tertulis dan lisan. Untuk melakukan konsultasi tertulis, pemeriksa harus membuat nota dinas ketika menemukan permasalahan hukum dalam proses pemeriksaan. Pemeriksa, kata Najib, harus mengajukan surat kepada kepala sub auditorat, kepala auditorat, auditor utama, dan barulah kepada Ditama Binbangkum.

"Kaditama Binbangkum kemudian mendisposisi kepada pejabat di bawahnya untuk membuat pendapat hukum atas permasalahan hukum tersebut," ujar Najib.

Sementara dalam melakukan konsultasi secara lisan, pemeriksa bisa datang langsung ke unit kerja terkait di Ditama Binbangkum untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. "Dua cara ini ada kelebihan dan ke-

kurangannya," ucap Najib.

Kelebihan konsultasi secara tertulis, ujar Najib, adalah pendapatnya resmi dan sudah melalui *quality control* serta dikoreksi berjenjang. Lalu, pendapat tersebut terdokumentasi dengan baik. Kekurangannya, proses ini membutuhkan waktu lama. Karena harus dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat pemeriksa maupun di Ditama Binbangkum, pemeriksa terkadang jadi segan untuk berkonsultasi.

Sementara, konsultasi secara lisan memiliki kelebihan dari segi kecepatan waktu. Hanya saja, pendapat hukumnya tak resmi karena tidak diutarakan secara tertulis. Sehingga, kurang kuat untuk dijadikan acuan karena tidak ada *quality control*. Pendapat hukum yang diberikan sangat bergantung kepada siapa pejabat yang ada saat itu untuk memberikan konsultasi. Selain itu, tidak ada *review* berjenjang dari para pejabat terkait.

Untuk menyempurnakan dua prosedur konsultasi hukum itu, Ditama Binbangkum membuat inovasi agar pemeriksa semakin mudah untuk berkonsultasi. "Tidak ribet dan membutuhkan waktu yang lama serta tidak melalui banyak prosedur. Tapi, tetap ada *quality control* dan terdokumentasi. Maka kami membuat aplikasi konsultasi hukum ini," ujar Najib.

Aplikasi Konsultasi Hukum Online dimasukkan ke dalam sistem manajemen hukum. Ia menjelaskan, sistem manajemen hukum adalah rumahnya Ditama Binbangkum. Kata dia, sistem manajemen hukum akan dilengkapi aplikasi lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Ditama Binbangkum. Salah satunya adalah *database* peraturan yang bisa diakses oleh para pelaksana BPK.

"Rencananya, selama menyangkut tugas dan fungsinya BPK, semua hal bisa ditanyakan di situ. Tapi, sementara kita fokusnya di pemeriksaan terlebih dahulu," jelas Najib.

Najib mengungkapkan, Aplikasi Konsultasi Hukum Online dirancang sejak awal 2018. Proposal dibuat pada bulan Januari dan diuji coba di Auditorat

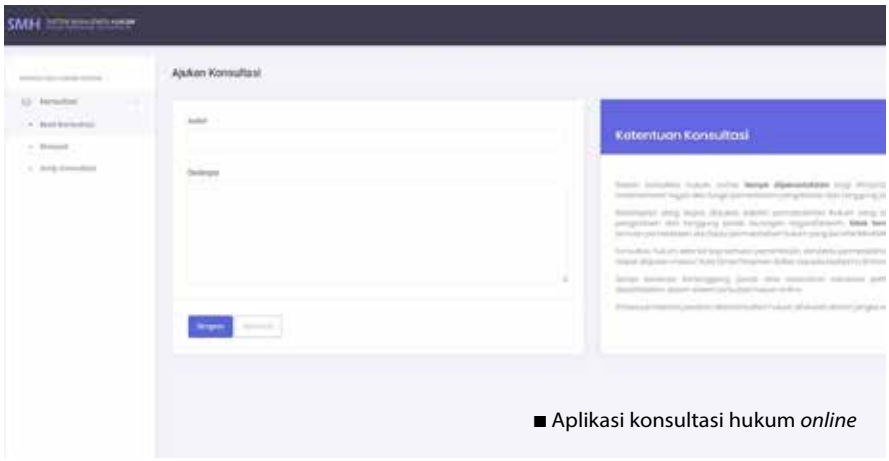

■ Aplikasi konsultasi hukum *online*

• Muh Najib

Keuangan Negara II pada pertengahan Juli tahun lalu. Pada saat uji coba, ia menyatakan aplikasi ini mendapatkan tanggapan positif dari pemeriksa. Setelah mendapatkan tanggapan positif dan mengevaluasi kekurangannya, aplikasi itu diperbaiki hingga akhirnya bisa diresmikan pada 3 Desember 2018.

Untuk memaksimalkan pelayanan, aplikasi ini akan dikelola oleh beberapa orang admin. Admin tersebut harus membuka permohonan yang masuk setiap hari kerja. Meski pemeriksa bisa berkonsultasi kapan saja, namun prosesnya tetap di hari kerja.

Konsultasi yang masuk melalui aplikasi tersebut akan diteruskan ke unit terkait. Kemudian, diteruskan lagi menuju penelaah di masing-masing subdirektorat. Konsep jawaban dari konsultasi yang diajukan di-*review* oleh kepala subdirektorat, kepala direktorat, bahkan kepala direktorat utama (kaditama) kalau memang itu permasalahan yang membutuhkan kebijakan kaditama. "Kalau tidak terlalu rumit bisa kasubdit atau kadit yang *approve*," ungkap dia.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, laporan hasil pemeriksaan BPK yang terbebas dari kesalahan hukum merupakan tanggung jawab bersama semua unsur dan semua unit organisasi di BPK. Oleh karena itu, *roadmap* penyempurnaan proses bisnis BPK tahun 2014-2020 telah memberikan desain bagi setiap unit organisasi BPK untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara bersinergi antarunit kerja.

Ditama Binbangkum dan Subbag Hukum di perwakilan sebagai unit kerja bidang hukum, merupakan bagian dari Sistem Manajemen Mutu (SMM) Pemeriksaan dan berperan dalam memberikan konsultasi hukum dan/atau pendapat hukum atas permasalahan hukum dalam pemeriksaan.

Menurut dia, konsultasi hukum atau pendapat hukum diperlukan untuk meminimalkan risiko hukum atas LHP BPK. Kebutuhan akan konsultasi hukum dalam proses pemeriksaan, ujar Bahrullah, tentunya harus menyesuaikan dengan karakteristik pemeriksaan yang semakin dinamis. Sehingga, proses pemberian pendapat hukum yang selama konservatif, perlu disempurnakan sesuai dengan karakteristik pemeriksaan yang semakin dinamis.

"Untuk itu, Ditama Binbangkum bekerja sama dengan Biro TI pada tahun 2018 ini telah mengembangkan Aplikasi Konsultasi Hukum Online dengan harapan dapat lebih memudahkan bagi pemeriksa dalam meminta pendapat hukum selama proses pemeriksaan berlangsung," kata Bahrullah.

Aplikasi hukum *online* dapat diakses melalui laman *http://smh.bpk.go.id.* ●

Ketua BPK Dukung Program Kerja Ikatan Akuntan Indonesia

IAI memiliki program Akuntan Masuk Desa yang bertujuan membantu desa untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

■ Ketua BPK hadir dalam pembukaan Kongres XIII IAI

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan, BPK mendukung penuh langkah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengoptimalkan kontribusinya bagi negara. Hal tersebut disampaikan Moermahadi saat menghadiri Kongres XIII IAI di Jakarta, Desember 2018.

Moermahadi mengatakan, perekonomian Indonesia yang semakin berkembang diikuti dengan meningkatnya bisnis di masyarakat. Pendapatan penduduk kelas menengah juga terus meningkat. Moermahadi mengungkapkan, data kustodian efek Indonesia menyebutkan ada peningkatan investor yang cukup signfikan, yaitu sebesar 25,24 persen atau ada 1.118.913 pelaku ekonomi baru.

Saat ini, lanjut dia, banyak pula kalangan generasi milenial yang mulai masuk dunia investasi, baik di reksadana, saham, maupun sarana investasi lainnya dengan memanfaatkan kemudahan dan kemajuan teknologi. Namun sayangnya, ada keengganan calon investor untuk melakukan penelitian. Sebab, keputusan investasi bisa dibuat dengan sangat mudah melalui ponsel pintar.

"Literasi keuangan atau tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan masih rendah," kata Moermahadi.

■ Pembukaan Kongres XIII IAI

■ Foto bersama para pengurus IAI dengan Presiden Joko Widodo

Menurut dia, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat mudah tertipu dengan produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dan risikonya. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016 menunjukkan, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru 29,6 persen. Artinya, dari 100 orang Indonesia, hanya 29 orang yang mempunya pemahaman yang baik tentang keuangan.

Sementara, tingkat inklusi atau akses lembaga keuangan baru mencapai 67, 82 persen. Angka tersebut masih di bawah Singapura (96 persen), Malaysia (81 persen), dan Thailand (78 persen).

■ Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI dengan Presiden RI

Moermahadi menambahkan, selain rendahnya literasi dan inklusi keuangan, permasalahan penting lainnya adalah banyak perusahaan yang belum memberi informasi keuangan yang akurat dan andal. Padahal, laporan itu penting untuk mencerminkan kondisi riil perusahaan terhadap calon investor.

Menurut dia, kondisi itu terjadi karena belum adanya peraturan yang terkait dengan kewajiban membuat laporan keuangan pada berbagai tingkatan perusahaan atau entitas lainnya. Banyak penelitian yang membahas pentingnya laporan keuangan. Salah satunya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengguna atau entitas laporan keuangan tersebut.

"Laporan keuangan menyangkut kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Laporan keuangan juga alat *check and balance*, konsep *good governance*. Salah satu komponennya adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan baik di tingkat korporat maupun pemerintahan," ujar dia.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo mengatakan, Kongres XIII IAI mempunyai peran yang sangat strategis. Dalam kongres itu, IAI menyusun perspektif organisasi berupa 'Prakarsa 6.1: Meneguhkan Kejayaan Akuntan Profesional, Kejayaan Negeri'. Prakarsa 6.1 ini menjadi panduan organisasi untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era ekonomi digital.

Saat ini, kata Mardiasmo, IAI telah mewujudkan program Akuntan se-Nusantara yang keberadaannya tersebar di 34 provinsi. Akuntan se-Nusantara yang bernaung di bawah IAI adalah akuntan profesional yang berkiprah sebagai akuntan sektor publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan pajak, hingga akuntan syariah yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 55 ribu orang. Semua akuntan itu memiliki peran di seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.

IAI juga memiliki program Akuntan Masuk Desa yang digawangi IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik dan IAI Wilayah seluruh Indonesia. Melalui program itu, IAI siap mendukung program pemerintah untuk membantu ribuan desa di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. "Lebih 17 ribu aparat desa telah mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa," ucap Mardiasmo.

Selain itu, IAI menjalankan program Akuntan Masuk Pesantren. Tujuannya, demi meningkatkan akuntabilitas ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia agar dapat memberdayakan ekonomi umat. Terkait upaya itu, IAI Kompartemen Akuntan Syariah telah menyusun Pedoman Akuntansi Pesantren bersama Bank Indonesia.

IAI telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Zakat dan PSAK Wakaf untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. "Untuk mempercepat literasi PSAK Wakaf ini ke kalangan pengguna, IAI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Wakaf Indonesia pada akhir November 2018," jelas Mardiasmo yang juga Wakil Menteri Keuangan tersebut. ●

JDIH BPK Kembali Raih Penghargaan

JDIH BPK mencoba menghadirkan menu lain yang tidak dipunyai oleh JDIH lembaga lain.

Kabar gembira datang dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berada di bawah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum). Pada 10 Desember 2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) menganugerahi JDIH BPK sebagai JDIH terbaik kedua se-Indonesia untuk kategori kementerian/lembaga.

Kepala Ditama Binbangkum Nizam Burhanuddin mengatakan, JDIH BPK sering mendapatkan penghargaan dari BPHN. Bahkan, kata dia, JDIH BPK juga pernah menjadi juara pertama. "Alhamdulillah sering mendapat penghargaan. Sekarang juara dua. Persaingan memang ketat," kata Nizam kepada *Warta Pemeriksa*.

Nizam mengungkapkan, pesaing ketat JDIH BPK adalah Kementerian Keuangan. Dia mengakui, JDIH Kementerian Keuangan dikelola dengan bagus. Sebab, informasi dari Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan seluruh pelosok Indonesia.

Dia menambahkan, hal itu menjadi pemicu BPK untuk terus memperbaiki dan mengembangkan JDIH. Saat ini, kata Nizam, JDIH BPK memiliki perpustakaan hukum yang cukup bagus yang dikelola Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Koleksi perpustakaan JDIH BPK terdiri atas buku hukum, peraturan perundang-undangan, risalah UUD 1945, dan risalah beberapa peraturan lain. Bahkan, ada juga koleksi *Staatsbladdan Bijblaads* yang merupakan peraturan sejak zaman kolonial.

Nizam menjelaskan, JDIH sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. JDIH menyediakan data yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai entitas, hingga dokumen dan informasi hukum lainnya.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, lanjut dia, diperlukan suatu dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. "Dahulu, untuk mendapatkan dokumentasi dan informasi hukum dari masing-masing lembaga sangat susah, karena belum ada teknologi informasi," kata Nizam, kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Atas alasan itulah kemudian dibuat JDIH. Dengan adanya JDIH, biro hukum kementerian dan lembaga dapat saling

■ Kepala Ditama Binbangkum BPK, Nizam Burhanuddin, menerima penghargaan

bertukar informasi hukum, terutama terkait peraturan perundang-undangan yang diterbitkan masing-masing lembaga. Secara sederhana, JDIH merupakan sarana mengumpulkan, mengolah, dan memberikan layanan informasi hukum kepada semua pihak yang membutuhkan.

BPK sampai saat ini telah menerbitkan 28 peraturan. Nizam mengakui, jumlah itu masih kalah jauh dibandingkan lembaga lagi, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan lainnya yang merupakan pembuat peraturan teknis.

Oleh karena itu, JDIH BPK mencoba menghadirkan menu lain yang tidak dipunyai oleh JDIH lembaga lain, antara lain tulisan hukum. Tulisan berisi kajian singkat suatu masalah secara normatif. Salah satu contohnya adalah catatan berita yang berisi komentar secara normatif atas berita terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

JDIH BPK juga menyajikan matriks perbandingan peraturan apabila ada perubahan peraturan. Kemudian, risalah sidang Mahkamah Konstitusi yang bersifat publik. "Selain itu, kami juga menampilkan glosarium istilah hukum secara *online*," jelas dia.

Untuk memberikan informasi hukum secara optimal kepada setiap pengguna, baik kalangan internal maupun eksternal BPK, JDIH BPK turut menampilkan seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Presiden.

Ada juga beberapa Peraturan Menteri yang dibutuhkan masyarakat. Untuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, JDIH BPK juga menyertakan keterangan apakah peraturan tersebut masih berlaku, sudah diubah, atau sudah dicabut. Khusus untuk Undang-Undang, disertakan pula Putusan MK yang membatalkan ketentuan Undang-Undang yang dicabut MK. ●

Komitmen BPK Membangun Zona Integritas

■ Sekjen BPK, Bahtiar Arif, menerima penghargaan

Pembangunan Zona Integritas bertujuan agar reformasi birokrasi dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Kerja keras Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membangun Zona Integritas berbuah manis. BPK mendapat penghargaan sebagai lembaga yang telah berhasil menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kepada Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif. Dalam acara bertajuk "Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018" yang digelar di Jakarta, Senin, 10 Desember 2018, sebanyak tiga BPK Perwakilan juga mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja berpredikat WBK. Ketiga BPK Perwakilan itu adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mendorong semua kementerian dan lembaga untuk berlomba-lomba menjadi instansi yang bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi. Yang tak kalah penting, kata Wapres, adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat supaya terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, ini akan membuat pendapatan aparat juga meningkat," katanya.

Menpan RB mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi. Hal ini bertujuan agar reformasi birokrasi dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

Inspektur Utama BPK Ida Sundari mengatakan, BPK sangat berkomitmen membangun Zona Integritas. Hingga saat ini, sudah ada 13 satuan kerja (satker) yang mendapat predikat WBK dan 1 satker meraih WBBM, yaitu Badan Diklat PKN.

"Memang semua pencapaian ini kembali kepada satker. Itama sebagai penggerak. Pembangunan Zona Integritas ini akan terus kita gerakkan," kata Ida.

Ida menjelaskan, WBK/WBBM merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, satker harus melakukan peningkatan dalam beberapa hal, antara lain tata kelola, laporan keuangan, hingga sumber daya manusia (SDM).

Itama sebagai penggerak Zona Integritas memberikan bimbingan dalam hal komponen pengungkit, yaitu komponen yang dilakukan oleh satker untuk membuat inovasi. "Misalnya pengadaan barang, SDM, atau laporan keuangan. Mereka membangun suatu sistem. Kami di situ sebagai tim penilai internal sebelum dinilai oleh TPN (Tim Penilai Nasional) dari Kemenpan RB, Ombudsman, dan KPK. Ketiga kementerian dan lembaga itulah yang memberikan apakah suatu entitas pantas atau tidak diberikan predikat WBK/WBBM," katanya.

Jurus BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng Ade Iwan Ruswana mengatakan, ada enam langkah yang telah dilakukan BPK Perwakilan Kalteng sehingga mendapat predikat WBK. Pertama, kata Ade, melaksanakan manajemen perubahan di lingkungan Perwakilan. Hal ini dilakukan dengan membangun Tim Pembangun WBK, menyusun rencana kerja dan mengevaluasi capaian rencana secara berkala, melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai, serta menetapkan agen perubahan yang berasal dari pegawai struktural maupun fungsional yang memiliki pengaruh yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.

Jurus kedua, BPK Perwakilan Kalteng melakukan peningkatan tata laksana, yaitu dengan memastikan bahwa setiap pegawai telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar, POS, pedoman dan Instruksi Kerja (IK) yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPK Kalteng telah memanfaatkan teknologi informasi, di antaranya aplikasi SIMAK, SIPTL, SISDM, SIKAD, SMP, E-Drive, dan lain-lain.

"Perwakilan juga telah mengembangkan beberapa inovasi berupa aplikasi sederhana untuk memudahkan pelaksanaan tugas layanan di Perwakilan. Antara lain Layanan Klinik Hukum pada Subbagian Hukum, Pengelolaan KKP melalui aplikasi E-KKP pada Subauditorat, Aplikasi Manajemen Talent/Talent Pool pada Subbagian SDM, serta Aplikasi Layanan Perpustakaan, Layanan Tamu, dan Layanan PIK pada Subbagian Humas TU Kalan," ujar Ade kepada *Warta Pemeriksa*.

Ketiga, dilakukan Penataan Sistem Manajemen SDM dengan menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu kepada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, menetapkan pola mutasi pegawai sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi jabatan dan pengembangan karir pegawai. Kemudian, melakukan pengembangan pegawai melalui pelaksanaan diklat dan *inhouse training*.

"Penetapan target kinerja individu yang terkait dengan Kinerja Organisasi serta telah dilakukan pengukuran secara periodik terhadap target kinerja pegawai. Kemudian hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar pemberian *reward* bagi pegawai,"

Selain ketiga langkah itu, BPK Perwakilan Kalteng melakukan penguatan akuntabilitas. Penguatan itu dilakukan dengan adanya peran dan keterlibatan pimpinan yang secara aktif memberikan contoh seperti datang tepat waktu, aktif dalam rapat, penyusunan rencana kinerja, dan pengolahan akuntabilitas kinerja di lingkungan Perwakilan.

Langkah kelima, BPK Perwakilan Kalteng secara aktif melaksanakan penguatan pengawasan dalam hal pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan *whistle blowing system*, dan penanganan benturan kepentingan.

Adapun jurus keenam, Ade fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan standar layanan publik, khususnya pada kegiatan layanan tamu dan PIK.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Hermanto, menjelaskan, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memperoleh predikat WBK. Hermanto menilai, predikat WBK berhasil diraih atas keseriusan melakukan evaluasi terhadap penilaian WBK tahun-tahun sebelumnya. Bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, penilaian WBK Tahun 2018 merupakan penilaian ketiga. Pada dua tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara masih gagal memperoleh predikat WBK.

"Evaluasi atas kegagalan itu merupakan langkah awal sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan munculnya hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK," ujar dia.

Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah

■ Foto bersama para penerima Penghargaan Zona Integritas Tahun 2018

membangun komitmen Tim Pembangunan Zona Integritas yang dibentuk sejak awal 2018. Dia menjelaskan, Tim Pembangunan Zona Integritas merupakan ujung tombak dalam persiapan penilaian Zona Integritas menuju WBK.

"Adanya komitmen untuk memperoleh hasil terbaik yang dibuktikan dengan hasil penilaian awal Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang harus melampaui target," katanya. Sedangkan langkah-langkah lainnya pembangunan komunikasi internal dan eksternal, peran aktif pimpinan, dan penegakan komitmen.

Adapun keberhasilan BPK Perwakilan Sumatera Barat meraih WBK salah satunya adalah karena melakukan penguatan komunikasi publik dan menjadikannya sebagai area utama dalam proses pembangunan Zona Integritas.

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Pemut Aryo Wibowo menjelaskan, penguatan komunikasi di lingkungan internal dilakukan dengan memperbaiki simpul komunikasi untuk membangun kebersamaan, kesepahaman, dan kesamaan semangat dalam memaknai "ruh" dari pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi dan perbaikan secara terus menerus.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pola pikir pendekatan dari sekadar pemenuhan dokumen persyaratan dan penilaian Zona Integritas menjadi pendekatan aktivitas untuk membangun kinerja dalam melayani publik.

"Intinya, BPK Perwakilan Sumatera Barat membangun konsep 'suasana kerja yang enak tetapi tidak seenaknya," kata dia.

Selain penguatan komunikasi internal, dilakukan juga pendekatan yang lebih humanis kepada *stakeholders*. Salah satunya dalam hal penyerahan LHP. Seremonial penyerahan LHP dikurangi dan diganti dengan memperkuat komunikasi latar isi dari muatan penting LHP yang dilakukan secara personal kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah.

"Hal tersebut bertujuan untuk menjaga agar pesan penting rekomendasi BPK dapat dipahami dan komitmen tindak lanjutnya dapat dijaga," kata Pemut. ●

Sekilas tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

OLEH **DEDY**
Anggota Tim Penyusun Manajemen Risiko
Disupervisi oleh Inspektur Utama BPK, Ida Sundari

■ Pimpinan BPK dalam Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko 2018

Tanpa adanya dukungan dan komitmen dari Badan dan seluruh Pejabat Struktural, tentunya sangat mustahil dalam membangun MR.

Setiap organisasi baik publik maupun swasta akan menghadapi ketidakpastian dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Ketidakpastian tersebut bisa diidentifikasi sebagai risiko, baik itu positif maupun negatif. Risiko bisa muncul dari faktor eksternal seperti politik, ekonomi, peraturan pemerintah, dan lainnya. Sedangkan faktor internal antara lain adalah budaya organisasi dan sumber daya organisasi.

Atas dasar hal tersebut, dalam mencapai dua tujuan strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu pertama, meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan kedua, meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, maka diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal yang komprehensif sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mencakup lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Sejak ditetapkannya SK tersebut sampai dengan tahun 2017, pengendalian risiko melalui penguatan SPI belum dilakukan secara komprehensif sehingga diperlukan suatu sistem manajemen khusus yaitu Manajemen Risiko (MR). Pembentukan Manajemen Risiko dimulai dari dilantiknya Staf Ahli Manajemen Risiko pada tanggal 28 Juli 2017. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2018, Wakil Ketua BPK mengarahkan agar dibentuk tim penyusun Kebijakan Manajemen Risiko (MR) dan juga berfungsi sebagai tim *ad hoc* untuk memulai penerapan Manajemen Risiko di BPK tahun 2018. Wakil Ketua bertindak sebagai Pengarah dalam tim tersebut. Manajemen Risiko di BPK berbasis pada ISO 31000: 2009 kemudian diperbarui dengan ISO 31000: 2018.

Tentunya pembangunan suatu sistem diawal bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim *ad hoc* dalam penyusunan awal Manajemen Risiko:

1. Menyusun telaahan yang berjudul "Telaahan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK";
2. Rapat antara tim *ad hoc* dengan intensitas lebih dari sekali dalam tiap minggu sejak dibentuknya tim sampai dengan berakhirnya *piloting* penerapan MR;
3. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang Ivan Lanin (Praktisi MR) serta sektor publik yang telah menerapkan MR seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Keuangan, dan Badan Sertifikasi Nasional;
4. *Sharing Knowledge* terkait Manajemen Risiko dengan Ernst & Young (EY);
5. Penyebaran kuesioner, permintaan masukan dan *workshop* dengan semua Satuan Kerja di Lingkungan BPK khususnya para manajer risiko satker;
6. Mengirimkan 11 orang (5 orang dari Ditama Revbang dan 6 orang dari Itama) untuk mengikuti kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Internasional Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia.

Semua proses di atas merupakan proses yang dibutuhkan dalam mengadopsi ISO 31000: 2018 tentang Manajemen Risiko. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu sistem yang baku terkait MR, sehingga MR akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi.

Dengan diadopsinya ISO 31000: 2018 sebagai dasar penyusunan MR, maka Prinsip (*Principle*), Kerangka Kerja (*Framework*) dan Proses (*Process*) akan menjadi struktur dalam pembangunan Manajemen Risiko di BPK.

PRINSIP (*PRINCIPLE*), KERANGKA KERJA (*FRAMEWORK*) DAN PROSES (*PROCESS*) MR DI LINGKUNGAN BPK SESUAI ISO 31000: 2018

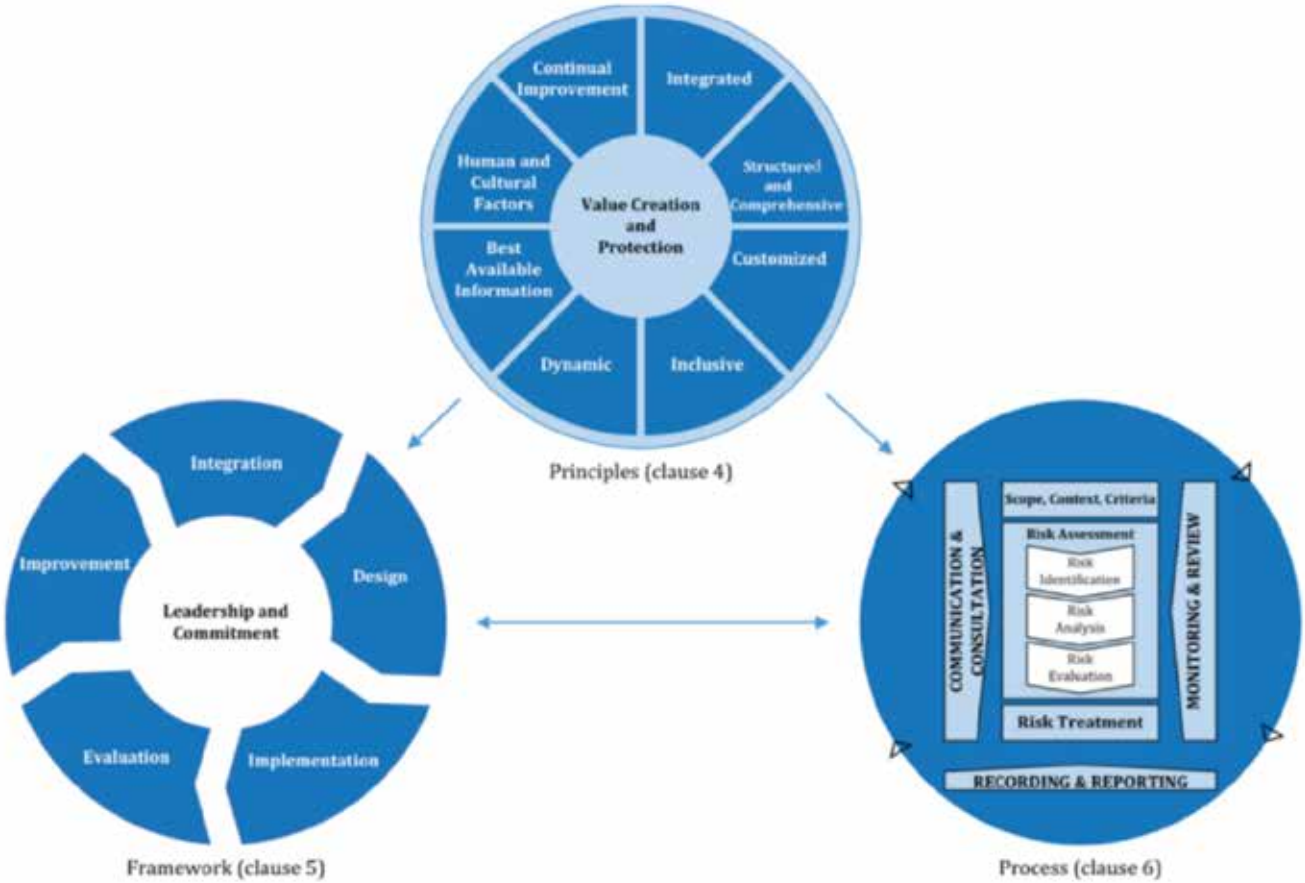

■ Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK menandatangani Piagam Manajemen Risiko Tahun 2018

Visi:

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

> Untuk mendukung perolehan informasi, BPK sedang menyempurnakan suatu sistem informasi khusus untuk memantau pengelolaan risiko.

Prinsip MR

Prinsip ini merupakan dasar atau landasan dalam mengelola risiko dan harus dipertimbangkan sebelum penetapan kerangka kerja dan proses MR. Prinsip MR di BPK sesuai ISO 31000: 2018 adalah sebagai berikut:

PRINSIP MR DI LINGKUNGAN BPK

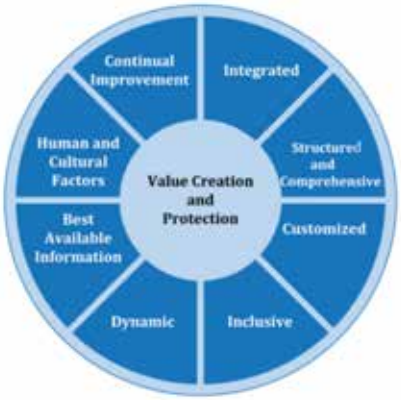

a. Menciptakan dan melindungi nilai (*value creation and protection*)

Penciptaan nilai tertinggi bagi BPK adalah tercapainya visi yang juga mengandung misi organisasi. Adapun visi dan misi BPK adalah:

b. Terintegrasi (*Integrated*)

Manajemen Risiko melekat pada seluruh proses bisnis BPK. Selain itu, juga disebutkan secara jelas tanggung jawab pemilik risiko yaitu di Level BPK *Wide*, Level Eselon I dan Level Eselon II.

c. Terstruktur dan menyeluruh (*Structured and Comprehensive*)

MR di lingkungan BPK disusun melalui pendekatan sistem kajian risiko yang efisien dan efektif yang kemudian hasilnya dapat dibandingkan dan menciptakan pemahaman yang sama disemua level organisasi.

d. Disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (*Customized*)

Penyusunan MR ini disesuaikan dengan Sasaran dan budaya organisasi serta sumber daya yang dimiliki oleh BPK untuk mengelola risiko.

e. Inklusif (*Inclusive*)

Penerapan MR melibatkan seluruh bagian organisasi. Hal ini terlihat dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak eksternal dan internal; dan Penyampaian kuesioner identifikasi risiko ke seluruh satker.

f. Dinamis (*Dynamic*)

Penerapan MR disesuaikan dengan kondisi masing-masing pelaksana BPK sehingga tidak adanya risiko yang telah dibakukan.

g. Informasi terbaik yang tersedia (*Best Available Information*)

Informasi terbaik terdiri atas tiga aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi, BPK sedang menyempurnakan suatu sistem informasi khusus untuk memantau pengelolaan risiko.

h. Faktor manusia dan budaya (*Human and Cultural Factors*)

Manajemen Risiko mempertimbangkan kultur, persepsi, dan kapabilitas sumber daya manusia BPK. Oleh karena itu, dilakukan *brainstorming*, FGD dan pelatihan terhadap para pelaksana di BPK.

i. Perbaikan berkelanjutan (*Continual Improvement*)

Manajemen Risiko akan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi.

Kerangka Kerja MR

Kerangka Manajemen Risiko mencerminkan siklus dari *plan*, *do*, *check*, dan *act* (PDCA) yang dapat diterapkan dalam seluruh desain sistem manajemen. Kerangka kerja MR membantu BPK khususnya dalam mengintegrasikan MR ke seluruh organisasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip MR yang telah dijelaskan di atas. Kerangka kerja MR di BPK yang sesuai dengan ISO 31000: 2018 adalah:

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO DI BPK

> Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, perbaikan atas kerangka kerja, kebijakan dan rencana penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara terus menerus.

a. Kepemimpinan dan Komitmen (*Leadership and Commitment*)

Top manajemen dalam hal ini Badan juga berperan aktif dalam penyusunan MR yang terlihat dari Surat keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 tentang SPI dan melalui penetapan Surat Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPK dan Surat Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

b. Integrasi (*Integration*)

Seperti yang telah dijelaskan di Prinsip, bahwa MR harus melekat dalam setiap proses bisnis sehingga fungsinya bisa menjadi berjalan sebagaimana mestinya yaitu membantu dalam pengambilan keputusan dan membantu dalam tata kelola (*good governance*) organisasi.

c. Perancangan (*Design*)

Perancangan MR di lingkungan BPK tentunya juga memperhatikan konteks eksternal (sosial, budaya, harapan para pemangku kepentingan eksternal, dan sebagainya) dan juga konteks internal (visi, misi, tata kelola, kebijakan, SDM, dan sebagainya). Perancangan ini juga menetapkan pihak-pihak yang akan bertanggung jawab dalam mengelola risiko, alokasi sumber daya dan membangun metode komunikasi dan konsultasi.

d. Implementasi (*Implementation*)

Dalam tahap ini, BPK menyusun suatu rencana penerapan, termasuk jadwal dan kebutuhan sumber daya dalam mengelola risiko, melakukan identifikasi risiko sampai dengan penanganan atas risiko yang mungkin dihadapi.

e. Evaluasi (*Evaluation*)

Dalam rangka memastikan bahwa Manajemen Risiko berjalan efektif dan terus mendukung kinerja organisasi, BPK akan mengukur keberhasilan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Indikator Risiko Utama (IRU) yang telah ditetapkan, mengukur kemajuan dan penyimpangan rencana MR dan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko.

f. Perbaikan (*Improvement*)

Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, perbaikan atas kerangka kerja, kebijakan dan rencana penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara terus menerus. Perbaikan berkelanjutan tersebut terkait dengan Manajemen Risiko maupun budaya Manajemen Risiko organisasi.

Proses Manajemen Risiko di BPK

Proses Manajemen Risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan berbagai pendekatan untuk aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan reviu. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Proses MR di BPK berdasarkan ISO 31000: 2018 adalah sebagai berikut:

PROSES MANAJEMEN RISIKO DI BPK

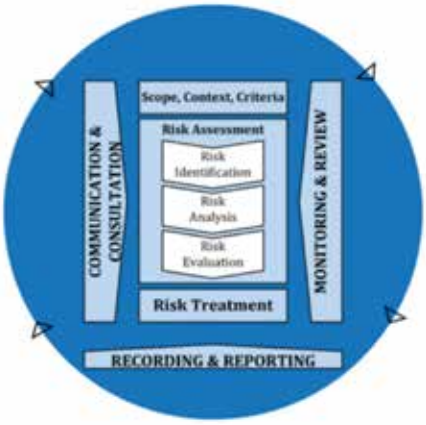

a. Komunikasi dan Konsultasi (*Communication and Consultation*)

Hal ini dilakukan di semua tahapan agar koordinasi dalam proses manajemen risiko dapat melindungi "Nilai" atau yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

b. Penetapan Konteks

Merupakan suatu tahap yang merancang proses manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan BPK sehingga berjalan dengan efektif. Dengan penetapan suatu konteks, BPK mengartikulasikan sasarannya, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang diperhitungkan pada saat pengelolaan risiko, serta menetapkan lingkup kerja dan kriteria risiko untuk proses yang masih ada.

c. Penilaian risiko

Terdiri dari 3 langkah, yaitu identifikasi (menemukan kejadian risiko yang bisa menghambat dalam pencapaian sasaran organisasi), analisis risiko (pertimbangan detail terkait kemungkinan keterjadian dan tingkat dampak dari suatu kejadian risiko) dan evaluasi risiko (langkah penentuan apakah suatu risiko diterima atau disusun suatu langkah untuk meminimalisir frekuensi dan dampak dari suatu kejadian risiko). Dalam langkah evaluasi risiko, kejadian risiko dikategorikan dalam lima kelompok yaitu Sangat Tinggi (*Red*), Tinggi (*Orange*), Sedang (*Yellow*), Rendah (Hijau) dan Sangat Rendah (Biru). BPK menetapkan *risk appetite*/selera risiko (suatu keadaan pada saat organisasi memilih untuk menerima level risiko tersebut tanpa dilakukan penanganan lebih lanjut) yaitu di kategori rendah dan sangat rendah.

d. Penanganan Risiko (*Risk Treatment*)

Hal ini meliputi penyeleksian dan pengimplementasian opsi-opsi untuk menghadapi risiko yang masuk kategori Sangat Tinggi, Tinggi dan Sedang di Evaluasi Risiko. Dalam tahap penanganan risiko, BPK akan melakukan suatu proses untuk memodifikasi risiko, khususnya dalam hal menurunkan potensi terjadinya risiko.

e. Pemantauan dan Reviu (*Monitoring dan Review*)

Tahap ini dilakukan sebagai langkah untuk menjamin dan memperbaiki keefektifan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi dan hasil akhir yang diharapkan. Proses pemantauan dan reviu atas penerapan Manajemen Risiko mencakup semua aspek dalam proses Manajemen Risiko dengan tujuan:

1. Memastikan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko;
2. Mengumpulkan informasi untuk pengembangan Manajemen Risiko;
3. Menganalisis dan melakukan proses pembelajaran dari kejadian, perubahan, tren, keberhasilan dan kegagalan;
4. Mendeteksi perubahan konteks eksternal dan internal, termasuk perubahan kriteria dan risiko yang memerlukan revisi penanganan dan prioritas risiko; dan
5. Mengidentifikasi risiko baru yang muncul.

f. Pencatatan dan pelaporan (*Recording and Reporting*)

Proses MR akan didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat guna:

1. Mengomunikasikan berbagai aktivitas proses MR dan keluarannya ke semua Pelaksana BPK.
2. Menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan.
3. Memperbaiki aktivitas proses MR.
4. Membantu interaksi dengan *stakeholder*.

Output yang dihasilkan dalam penerapan MR tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Surat Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPK dan Surat Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.
2. Piagam dan Profil Risiko tahun 2018 oleh Pimpinan BPK, Pejabat Eselon I dan II sebagai para pemilik risiko yang bertanggung-jawab dalam mengelola risiko.

Dari uraian di atas diketahui bahwa tahap awal penyusunan Manajemen Risiko ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tanpa adanya dukungan dan komitmen dari Badan dan seluruh Pejabat Struktural, tentunya sangat mustahil dalam membangun MR. Untuk itu dukungan dan komitmen dari para Pimpinan BPK tetap dibutuhkan dalam penerapan MR selanjutnya dengan harapan bahwa penerapan Manajemen Risiko yang telah disepakati bersama dapat meminimalisir hambatan dalam pencapaian sasaran atau tujuan organisasi. ●

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tugas BPK
BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Courtesy call Waka BPK RI dan Mongolia NAO di Kantor Pusat BPK RI, 10 Desember 2018.

Prosesi pemakaman Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi di Bogor, 8 Januari 2019.

Sepak Bola Eksekutif di GBK, 10 Januari 2019.

>>>

Wakil Ketua BPK dalam Seminar ICCOSED 2019 di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), 12 Januari 2019.

>>>

Anggota II BPK Agus Joko Pramono dalam kegiatan BPK Archery, 11 Januari 2019.

>>>

Peringatan HUT DWP BPK RI, 20 Desember 2018.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN RISET BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

GEDUNG BPK RI

JL GATOT SUBROTO
NO 31,
JAKARTA PUSAT

JAM PELAYANAN

SENIN-JUMAT
07.45 - 16.15 WIB

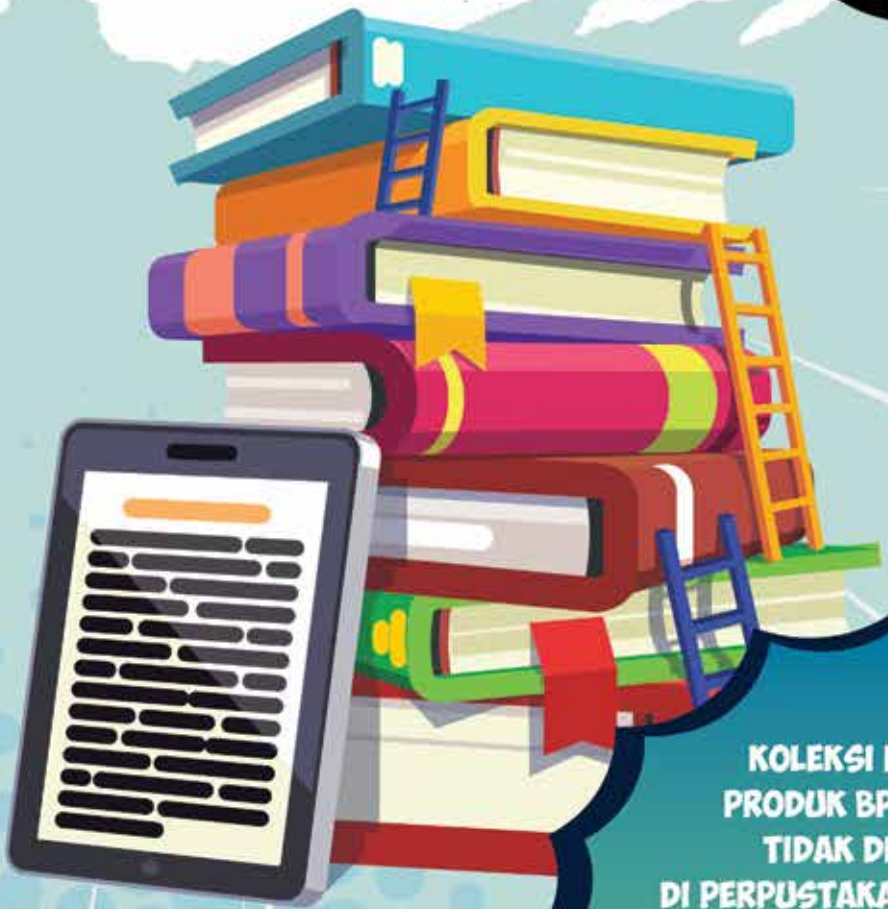

DESAIN RUANGAN MENARIK

KOLEKSI PRODUK-PRODUK BPK YANG TIDAK DIJUMPAI DI PERPUSTAKAAN LAIN

TERBUKA UNTUK UMUM

@bpkriofficial @humasbpkri.official @bpkri BPK RI official

Keluarga Besar BPK RI

Menyampaikan ikut berduka atas berpulangnya
Anggota VII BPK RI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi

"Semoga Allah SWT memberikan almarhum tempat terbaik di sisi-Nya... Aamiin..."